

# PROFIL WARIA DALAM PROGRAM PEDULI



Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

© 2020



# PROFIL WARIA DALAM PROGRAM PEDULI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

© 2020

# Penyusun

PKBI Pusat  
Konsultan Inang Winarso

## **Kontributor:**

Merlyn Sopjan · Halimah Irna Pujiati · Haryati Soemarto · Anggun Pradesha  
Citra (PKBI Daerah Aceh) · Leonardo (HW MKGR Sumsel)  
Rere (Sanggar Swara) · Yuyun (Srikandi Pasundan)  
Stella (PKBI Daerah Kalteng) · Dora (PKBI Daerah Kalsel)  
Dwi (PKBI DI Yogyakarta) · Ade (PKBI Daerah Sulsel)

## **Editor:**

Yudi Supriadi · Adhi Nur Kristianto

## **Penerbit:**

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)  
Jl. Hang Jebat III F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120  
email: [ippa@pkbi.or.id](mailto:ippa@pkbi.or.id)  
[www.pkbi.or.id](http://www.pkbi.or.id)

# Daftar Isi

<b>Terima Kasih</b>		v
<b>Ringkasan Eksekutif</b>		xiii
<b>Kata Pengantar</b>		xvii
<b>01 Pendahuluan</b>	A. Latar Belakang	1
	B. Sejarah dan Kerangka Teori	5
	C. Landasan Hukum	18
<b>02 Metodologi</b>		23
<b>03 Profil Waria</b>		27
	A. Tempat Tinggal dan Keluarga	28
	B. Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak	37
	C. Administrasi Kependudukan	41
	D. Pelayanan Kesehatan	44
	E. Penyesuaian Tubuh	47
	F. Kasus Hukum	55
<b>04 Perubahan Paling Signifikan— <i>Most Significant Change (MSC)</i></b>	A. Domain Perubahan	64
	B. Fasilitator & Agen Perubahan	67
	C. Perubahan Signifikan Domain Individual	70
	D. Perubahan Signifikan Domain Kultural	72
	E. Perubahan Signifikan Domain Struktural	74
<b>05 Analisa dan Kesimpulan</b>		77
<b>06 Rekomendasi</b>		84



# Terima Kasih

Keberhasilan sebuah karya, tentunya ada peran-peran dari berbagai pihak yang selalu mendukung dan berkontribusi baik secara langsung dan tidak langsung. Demikian juga dengan terselesaikannya buku ini yang menjadi 'saksi' perjalanan Program Peduli Pilar Waria selama ini, sehingga dengan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. DFAT (*Department of Foreign Affair and Trade*)
2. *The Asia Foundation*
3. PKBI Daerah Aceh
4. Himpunan Waria MKGR Sumatera Selatan
5. Perkumpulan Sanggar Swara
6. Srikandi Pasundan
7. PKBI DI. Yogyakarta
8. PKBI Daerah Kalimantan Tengah
9. PKBI Daerah Kalimantan Selatan
10. PKBI Daerah Sulawesi Selatan

## 11. Aceh

- Tarena

## 12. Sumatera Selatan

- PKBI Daerah Sumatera Selatan
- Pembina HW MKGR Sumatera Selatan
- Kepala LPKA Palembang
- Kepala Lapas Perempuan Palembang
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- Media Sriwijaya

## 13. DKI Jakarta

- Arus Pelangi
- Komnas Perempuan
- LBH Jakarta
- LBHM Masyarakat
- GWL INA
- Yayasan Srikandi Sejati
- FKWI
- Yayasan Pesona Jakarta
- FBHUK

- Srikandi Partriot
- Pemuda Tapal Batas
- Program Yes I Can
- Unika Atmajaya
- Warga Kolong Jembatan Besi
- Warga Pesing Koneng
- Ketua RT 011 / 01 Pesing Koneng
- Komunitas Waria Telok Gong, Jembatan Besi, Pasar Pesing Koneng, Kapuk Muara, Jatinegara

#### 14. Jawa Barat

- PKBI Daerah Jawa Barat
- Lurah dan Ketua RT - RW Tanjungpura
- Puskesmas Tanjungpura
- Dinas Kesehatan Kab. Karawang
- KPA Kab. Karawang
- Karang Taruna Karawang Timur
- Ketua Hiwaka, RT dan RW Kebon Kangkung Kiaracandong
- WPA Sumur Bandung, Bojongloa Kidul

- Ibu Imas (ibu kos)
- Dinas Kesehatan Kota Bandung
- Dinas Sosial Kota Bandung
- Keamanan Kiaracondong
- Disdukcapil Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat
- LBH Bandung,
- Lurah Kiara Condong
- Polsek Kiara Condong
- Seluruh Puskesmas di Kota Bandung
- LSM Petik
- Komisi 4 DPRD Kab. Kuningan
- Dinas Kesehatan Kab. Kuningan
- Dinsos Sosial Kuningan
- RT dan RW lingkungan Mekarsari Kecamatan Banjar
- Ibu Aje (ibu kos di Banjar)
- Rumah Cemara
- Warga Lingkungan Mekarsari

## 15. DI Yogyakarta

- Ikatan Waria Yogyakarta
- Pondok Pesantren Al Fatah
- Keluarga Besar Waria Yogyakarta
- Komunitas Waria di Kulonprogo, Sleman
- Aliansi Waria Peduli Yogyakarta
- Disperindagkop UMKM Prov. DIY
- Bakesbangpol Prov. DIY
- Dinas Kebudayaan Prov. DIY
- Dinas Pariwisata Prov. DIY
- Dinas Sosial Prov. DIY
- SAPDA
- Jaringan Lumbung Pangan Jogja
- LBH Yogyakarta
- PT. Tribumi
- Ketua dan Warga RT 18 RW 05 Suryowijayan

## 16. Kalimantan Tengah

- Ikatan Waria Palangkaraya
- Komunitas Bahalap
- Lurah Langkai

- Warga Kampung Flamboyan Bawah Palangkaraya
- Dinas Sosial Kota Palangkaraya
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- Kesbangpol Kota Palangkaraya

## 17. Kalimantan Selatan

- Paris Barantai
- Ikatan Waria Tanah Laut
- Kepala Desa Asri Mulya Kab. Tanah Laut
- Kepala Desa Atu - Atu Kab. Tanah Laut
- Bukhori (PKBI Daerah Kalimantan Selatan)

## 18. Sulawesi Selatan

- Kerukunan Waria Makassar dan Sulawesi Selatan
- Dinas Sosial Kota Makassar
- Dinas Pariwisata Kota Makassar
- Jaringan Jurnalis Kota Makassar
- Lurah Pattingaloang
- Camat Ujung Tanah, Makassar





AGARHA... ANINHA... KEBUDAYAAN... KARANGAS

SIN

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kehidupan global tengah mengalami degradasi demokrasi dan lunturnya pluralisme. Demokrasi dan pluralisme sedang diserang oleh kelompok anti demokrasi dan kekuatan otoriter. Indonesia tidak luput dari gempuran gelombang tersebut dan berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat. Kelompok waria sebagai kelompok minoritas, terkena imbas dari tekanan publik yang terpengaruh oleh pandangan bahwa waria adalah orang yang melanggar aturan agama dan norma sosial. Tekanan sosial itu merupakan wujud dari tindakan eksklusi. Padahal di dalam tradisi Bugis, waria ada yang jadi tokoh spiritual dengan sebutan *bissu*, dan di era orde baru, organisasi waria adalah sayap dari ormas Kosgoro.

Melihat gejala diskriminasi dan stigmatisasi terhadap waria semakin besar, maka Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) selaku mitra *The Asia Foundation (TAF)* melaksanakan Program Peduli Pilar Waria dengan pendekatan inklusi sosial sejak 2015 sampai 2020. Program tersebut dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan didukung dana dari pemerintah Australia melalui DFAT.

Program Peduli Pilar Waria bertujuan untuk meningkatkan penerimaan sosial masyarakat terhadap waria dan meningkatkan peran sosial waria di masyarakat. Melalui proses saling membutuhkan dan saling memberi antara waria dengan masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang lebih inklusif dan kesejahteraan waria

semakin meningkat. Selama program berlangsung, telah terjadi perubahan yang semakin baik di organisasi waria maupun kehidupan beberapa waria yang terlibat di dalam program peduli.

Dalam upaya mengidentifikasi perubahan yang signifikan (*most significant change*) yang terjadi dari hasil implementasi Program Peduli Pilar Waria disusun profil waria yang berasal dari delapan provinsi. Penyusunan profil waria menggunakan metode kombinasi atau *mix method* antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan teknik *survey*, yaitu menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup. Kuesioner kemudian dibagikan kepada waria di kota masing-masing dan diisi secara mandiri atau *self-completed questionnaire* selanjutnya di kembalikan ke peneliti. Metode kualitatif dengan teknik *photovoice* untuk menggali makna dari sudut pandang atau lensa waria. Teknik *photovoice* merupakan teknik seperti *story telling* yang memberikan kebebasan kepada informan atau narasumber menyampaikan pandangannya.

Penelitian berhasil merumuskan kesimpulan bahwa Program Peduli Pilar Waria berhasil melahirkan agen perubahan yang memfasilitasi terjadinya perubahan signifikan di masyarakat. Perubahan yang paling signifikan (*most significant change*) dialami oleh waria pada domain individu, kultural dan struktural. Proses perubahan tersebut terjadi karena ada peran dari fasilitator nasional, fasilitator daerah dan agen perubahan dari kelompok waria

Perubahan domain individu yang signifikan adalah waria yang terlibat secara aktif mendapatkan pekerjaan yang layak, dan trampil berorganisasi. Perubahan domain kultural terdiri dari penerimaan masyarakat terhadap waria meningkat, waria dilibatkan dalam kegiatan publik, dan waria merintis

terbentuknya Desa Inklusi. Perubahan domain struktural terdiri dari organisasi waria memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) sesuai UU no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan waria mendapat izin usaha resmi dari pemerintah dan organisasi waria mendapat izin dari MUI untuk melaksanakan kegiatan.

Akses mendapatkan pekerjaan yang layak masih harus diperjuangkan lebih keras lagi, terutama waria yang masih menjadi pekerja seks. Sementara akses kesehatan masih kurang baik, karena belum semua waria menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal yang positif adalah di tempat layanan kesehatan waria dapat mengakses berbagai jenis layanan tanpa diskriminasi.

Kecenderungan keluarga memaksa waria untuk menjadi laki-laki, masih terjadi. Meskipun angkanya di bawah 50%, namun mengakibatkan waria mengalami tekanan psikis. Pemahaman keluarga terhadap kebiasaan waria perlu ditingkatkan sehingga semua keluarga di Indonesia dapat menerima keberadaan waria ditengah masyarakat. Gejala ingin bunuh diri merupakan reaksi psikis atas tekanan yang dialami waria. Keinginan bunuh diri masih tinggi antara 10%-20%. Faktor pemicu keinginan bunuh diri adalah faktor tekanan dari keluarga untuk menjadi laki-laki dan faktor ekonomi.

Partisipasi waria di dalam kegiatan masyarakat khususnya kegiatan sosial semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa terjadi perubahan di masyarakat bahwa penerimaan sosial waria semakin tinggi. Akhirnya kesejahteraan waria semakin membaik seiring dengan berjalannya Program Peduli Pilar Waria.

Cita-cita mewujudkan masyarakat yang inklusif masih harus diperjuangkan dengan melanjutkan program seperti halnya program peduli dengan cakupan provinsi yang lebih luas.



PROGRAM  
peduli

**BAKTI SOSIAL**

**SRIKANDI PASUNDAN JAWA BARAT**  
**(PROGRAM PEDULI)**

KABUPATEN KARAWANG  
BAK COVID-19

# PENGANTAR

Salam persaudaraan,

Program peduli pilar waria adalah program dengan pendekatan inklusi sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan waria. PKBI sebagai pelaksana program ini, mendapatkan banyak pelajaran berharga dari lapangan. Peran komunitas waria sangat besar dalam mencapai keberhasilan tersebut.

Perubahan paling signifikan sudah dapat diidentifikasi di beberapa lokasi kegiatan. Namun masih banyak kekurangan di beberapa daerah. Saling belajar dan berbagi keberhasilan merupakan kunci dari pencapaian prestasi bersama dari seluruh komunitas waria.

Masyarakat dan pemerintah telah menunjukkan sikap penerimaan sosial yang tinggi terhadap komunitas waria. Hal tersebut tidak bisa lepas dari peran advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan oleh *community organizer* dan pelaksana program di lapangan. Kebanggaan yang tidak bisa dinilai harganya adalah ketika stigma dan diskriminasi terhadap waria dapat hilang dari tengah masyarakat.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang dalam, semua pelaksana program menundukan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya menjalankan program peduli pilar waria. Segala kesalahan dan kekurangan akan menjadi pemicu untuk berbuat lebih baik lagi.

Terimakasih.



## 01

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Momentum kehidupan demokrasi dicapai Indonesia pada saat peristiwa reformasi politik tahun 1998. Sejak saat itu kebebasan berpolitik, menyampaikan pendapat, berorganisasi dan memiliki pers yang independen menjadi suasana baru yang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Bahkan Indonesia pernah mendapat peringkat cukup baik di bidang pemenuhan hak warga negara. Secara umum hak dasar manusia hampir dipenuhi oleh negara dan warga negara dapat mengekspresikan kehendaknya dengan bebas, tanpa rasa takut dan ditekan oleh berbagai pihak yang memiliki kekuasaan.

*Freedom House* sebuah NGO yang didirikan tahun 1941 di New York, bahkan memberikan penilaian kepada Indonesia sebagai negara dengan predikat negara bebas mulai tahun 2013. Predikat tersebut sejajar dengan negara bebas di dunia seperti Australia, Finlandia, Kanada dan beberapa negara maju lainnya. Namun status sebagai negara bebas tidak berlangsung lama. Pada tahun 2014 *Freedom House* memberikan penilaian kepada Indonesia sebagai negara dengan status negara setengah bebas (*partly free*). Artinya, dalam aspek hak politik dan kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan dan butuh banyak perbaikan.

Status sebagai negara *partly free* ternyata terus berlangsung sampai dengan tahun 2019. Beberapa negara juga berada pada peringkat yang sama dengan Indonesia, diantaranya Malaysia, Filipina, Singapura, Pakistan, Bangladesh, Mexico, Nigeria, Sri Lanka dan lainnya<sup>1</sup>.

Faktor yang menyebabkan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia mengalami penurunan adalah terjadinya peristiwa diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan kaum marjinal. Ditambah dengan persoalan korupsi sistemik, ketegangan separatistis di wilayah Papua dan penerapan pasal pencemaran nama baik dan penistaan di dalam delik hukum yang diajukan ke pengadilan.

Diantara kelompok marjinal yang diabaikan oleh negara dalam hal pemenuhan hak politik dan hak sipil adalah kelompok LGBT. Di dalam laporan *Freedom House* disebutkan bahwa penurunan status kebebasan dan penegakan hak asasi manusia pada kelompok LGBT di Indonesia berdasarkan indikator sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. *LGBT people, who are also poorly represented in electoral politics, abstain from voting.*
2. *Journalists covering sensitive subjects, including LGBT issues, face harassment and threats.*
3. *Hard-line groups are known to threaten discussions on LGBT matters, interfaith issues, and the 1965-66 anti-communist massacres.*
4. *Authorities and influential Muslim organizations have continued to intimidate and harass LGBT people and activists.*

---

<sup>1</sup> Lihat laporan Freedom House dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Laporan diakses di <https://freedomhouse.org>

<sup>2</sup> Ibid

5. *Hamper groups seeking to provide services to LGBT people*
6. *LGBT people suffer from widespread discrimination, and authorities continue to target LGBT people with inflammatory and discriminatory rhetoric.*
7. *LGBT people also risk attacks by hard-line Islamist groups, sometimes with support from local authorities.*
8. *Sharia-based ordinances in a number of districts impose restrictions on dress, gambling, alcohol use, and sexual activity; these ordinances are disproportionately enforced against women and LGBT people.*

Kejadian tersebut menuntun Indonesia kedalam situasi yang makin jauh dari pelaksanaan demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia. Diskriminasi dan proses eksklusi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap kelompok LGBT berbarengan dengan munculnya benih intoleransi yang meluas pada isu-isu kemasyarakatan lainnya, seperti *sentiment* rasial, persekusi terhadap penganut kepercayaan dan penyebutan aliran sesat kepada kelompok minoritas di dalam satu agama.

Kecenderungan global sedang terjadi degradasi kehidupan demokrasi dan pluralisme. Bahkan disebutkan demokrasi dan pluralisme sedang diserang oleh kekuatan otoriter di dalam negara dan kelompok anti demokrasi. Kelompok etnis, agama dan minoritas lainnya menanggung beban pelanggaran pemerintah, di negara-negara demokrasi dan otoriter. Ciri kekuasaan yang demokratik di awal pemerintahan di beberapa negara berubah menjadi kebrutalan rezim otokratis yang tidak terkendali dan pembusukan etika dalam kekuatan demokratis, membuat pemerintah di manapun mengalami kesulitan untuk memenuhi hak asasi manusia.

Waria sebagai salah satu komunitas yang dikelompokkan ke dalam LGBT, mengalami tekanan sosial dan politik yang demikian hebat di era kemunduran demokrasi dan pluralisme. Penampilan waria yang seringkali mencolok di tengah masyarakat, memudahkan orang mengenali dan menimbulkan reaksi dari publik. Reaksi publik pada dua atau tiga tahun belakangan terhadap waria sangat tidak menyenangkan. Persekusi dan penistaan keberadaan waria menyebabkan jatuh korban di kalangan waria. Termasuk dalam penegakan hukum kepada waria, dinilai tidak adil.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka solusi bagi masyarakat Indonesia yang beragam etnis, suku, bahasa, agama, orientasi seksual, kemampuan ekonomi, pendidikan dan sebagainya, adalah menyatukannya ke dalam prinsip inklusi sosial. Perbedaan seharusnya bukan lagi hambatan untuk pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Keadilan sosial dan kerukunan hidup bersama seharusnya menjadi norma masyarakat sehari-hari. Namun pasang surut pemenuhan hak asasi manusia terus berlangsung dan hampir satu dekade, Indonesia sedang mengalami masa surut pemenuhan dan penegakan HAM.

Program Peduli yang dilaksanakan oleh PKBI sebagai mitra dari *The Asia Foundation* (TAF) dengan sumber pendanaan dari DFAT Australia, salah satu fokusnya adalah Pilar Waria. Dengan menggunakan pendekatan inklusi sosial, untuk menghadapi masalah ketidakadilan pada waria. Program ini mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Setelah program berjalan, dilakukanlah pendokumentasian menggunakan *survey* untuk memperoleh gambaran Profil Waria Program Peduli sampai dengan 2019. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program inklusi sosial pilar waria.

## SEJARAH DAN KERANGKA TEORI



Foto 1

Calabai yang berperan sebagai Bissu dalam acara/  
upacara adat Suku Bugis

### Keberadaan Waria

Di dalam buku “*Transgender History: The Roots of Today’s Revolution*” Susan Stryker<sup>1</sup> menjelaskan cuplikan sejarah di Amerika abad ke-16 tentang realita kehidupan waria dan kebijakan pelarangan laki-laki menggunakan pakaian perempuan yang disebut *in a dress not belonging to his or her sex* (seseorang yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya). Kemudian lahir pelarangan “*cross dressing*” di Massachusetts tahun 1690 sebagai salah satu kebijakan anti-waria:

*Thomas or Thomasine Hall was an indentured servant in Virginia in the 1620s who seems to have had intersex anatomy, and who lived sometimes as a man and sometimes as a woman. The colony of Massachusetts first passed laws against cross-dressing in the 1690s.*

<sup>1</sup> Susan Stryker. *Transgender History: The Roots of to Day’s Revolution*. Seal Press, NY, 2017.hal 45-46

Pada bagian lain Susan mengungkapkan bahwa ada upaya untuk memperkenalkan waria kepada masyarakat melalui karya sastra<sup>2</sup>,

“Sebuah majalah sastra populer, *The Knickerbocker*, bahkan menerbitkan sebuah cerita fiksi pendek pada tahun 1857 yang berjudul ”Pria yang Berpikir Dirinya seorang Wanita,” yang menawarkan potret simpatik seseorang dengan perasaan transgender”.

Menurut sejarawan Peter Boag dalam buku *Re-Dressing America's Frontier Past*<sup>3</sup> mencatat bahwa cerita tentang *cross-dresser* ada di mana-mana pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang diberitakan di surat kabar. Tujuan Peter Boag menulis buku tersebut adalah *pertama*, untuk memulihkan *cross-dresser* dan mengeksplorasi apa arti identitas seksual dan gender transgresif<sup>4</sup> bagi masyarakat dan komunitas mereka. Terungkap bahwa *cross-dresser* tidak hanya ada di mana-mana, tetapi sangat banyak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari terutama di perbatasan Amerika dan di Barat. *Kedua*, bagaimana dan mengapa sekelompok besar *cross-dressers* begitu kelihatan dan begitu banyak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Barat abad ke-19 begitu mudah dilupakan sehingga penemuan kembali mereka merupakan hal yang tidak terduga.

Inspirasi Peter dalam mempertanyakan dua hal di atas, berawal dari peristiwa publik yang terkenal pada akhir tahun 2005 yang mengekspos hubungan antara Amerika Barat dan aktivitas seksual dan gender transgresif. Peristiwa itu adalah peluncuran film layar lebar Hollywood berjudul *Brokeback Mountain*,

2 Susan Stryker, loc.cit

3 Peter Boag, *Re-Dressing America's Frontier Past*. University of California Press, 2011, hal 1

4 Transgresif adalah adopsi dari kata *transgress* yang berarti proses yang melewati batas-batas logika dan aturan yang membelenggu.

berdasarkan cerita pendek Annie Proulx dengan judul yang sama. Film tersebut berkisah tentang dua *cowboy* yang saling jatuh cinta di Brokeback Mountain tetapi kemudian masing-masing menikah dengan perempuan. Pernikahan mereka tidak melunturkan rasa cinta sesama jenis diantara mereka, selama 20 tahun berikutnya. Namun akhirnya salah satu meninggal dan menyimpan baju yang mereka berdua pakai ketika pertama kali bertemu. Film ini memicu perdebatan di publik, ada yang menilai sebagai lelucon dan ada yang penasaran untuk melakukan investigasi apakah benar ada *cowboy* yang menjalin hubungan sejenis?<sup>5</sup>

Reaksi masyarakat yang sebagian besar menolak atau mencibir kenyataan adanya homoseksual tidak terlepas dari kuatnya konsep *gender biner* yang membagi konstruksi sosial kedalam kategori maskulin dan feminin sebagai peran gender utama di masyarakat. Akibat kuatnya gender biner, maka terjadilah diskriminasi terhadap perilaku di luar dua konstruksi gender tersebut. Gender biner menimbulkan maraknya kekerasan fisik dan psikis kepada kelompok homoseksual termasuk waria.

Menurut analisa Pierre Bourdieu, kaum homoseksual adalah korban dari bentuk khusus dominasi simbolik dan di cap dengan stigma. Dan stigma adalah penindasan yang tidak terlihat yang dilakukan dengan penolakan atas keberadaan mereka yang sah dan bersifat publik. Yaitu penolakan atas keberadaan yang diketahui dan diakui oleh aturan hukum<sup>6</sup>.

Seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai waria, tidak bisa diabaikan keberadaannya sebagai individu warga negara. Di dalam teori warga negara, tidak dikenal kategori warga berdasarkan konstruksi

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 2

<sup>6</sup> Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hal 167-168

sosial atau gender. Yang lazim dikenal adalah perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Bentuk kelamin laki-laki berpenis, berbeda dengan bentuk kelamin perempuan yang bervagina. Perbedaan tersebut mengacu kepada bentuk fisik organ biologis, bukan kepada orientasi seksual maupun ekspresi seksual. Oleh sebab itu, hak sipil sebagai warga negara tidak bisa dihilangkan begitu saja ketika seorang waria ingin mendapatkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu BPJS dan identitas kependudukan lainnya. Secara hukum penolakan pemenuhan hak sipil terhadap waria dapat dikategorikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Dalam sejarah Indonesia, terdapat tradisi di Sulawesi, yang menempatkan waria sebagai orang yang memiliki kedudukan istimewa di masyarakat. Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki adat turun-temurun yang berhubungan dengan latar belakang persepsi sosial terhadap eksistensi *waria*.

*Berdasarkan Kitab La Galigo, kitab rakyat Bugis kuno, manusia tidak dapat berhubungan dengan penciptanya. Keadaan ini membuat lara sang pencipta, sehingga ia pun menurunkan manusia tanpa kelamin yang jelas, untuk memimpin upacara adat keagamaan. Oleh karena tanpa kelamin yang jelas, manusia ciptaan terakhirnya ini kerap disebut waria<sup>7</sup>.*

Orang Bugis mengenalnya sebagai *bissu*. Pada masa pra-Islam, *Bissu* merupakan golongan yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di pundak *bissu* inilah semua upacara keagamaan dibebankan, untuk dilaksanakan demi memuja sang pencipta. Upacara adat keagamaan *Mat*

---

<sup>7</sup> Titiek Suliyati, *Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis*, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol.2 No.1: Desember 2018, hal 52

*Temu Taung* (upacara syukuran diakhir tahun) merupakan salah satu upacara yang mengedepankan peran *bissu*. Acara ini harus dipimpin oleh *bissu*. Upacara tradisional di Sulawesi Selatan ini bermakna mencari keselamatan dan perlindungan dari sang pencipta.

Kaum *transvestites* Bugis ini memegang peranan yang begitu penting dalam kerajaan (*addatuang*), sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara ritual tanpa kehadiran *bissu* sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. Sehingga setiap *ranreng* atau semacam wilayah adat memiliki komunitas *bissu*.

Pada tradisi Bugis dikenal ada lima kategori gender yaitu: perempuan (*makunrai*), laki-laki (*uroane*), perempuan yang berpenampilan laki-laki (*calalai*) dan laki-laki yang berpenampilan perempuan (*calabai*). *Bissu* adalah gender kelima diluar empat gender yang sudah disebut. Sehingga di Bugis pembagian gender adalah: *makunrai*, *uroane*, *calalai*, *calabai* dan *bissu*. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan suku Bugis, *bissu* adalah *calabai*, tapi tidak semua *calabai* adalah *bissu*. Artinya, semua *Bissu* adalah orang laki-laki yang berpenampilan perempuan. Namun tidak semua orang laki-laki yang berpenampilan perempuan dapat disebut sebagai *Bissu*.

Leonard Y. Andaya<sup>8</sup> di dalam tulisannya, membuat kategori gender untuk masyarakat Bugis dibagi menjadi tiga kelompok. Penggunaan istilah kelompok ketiga untuk menunjukkan adanya gender lain di luar paradigma dominan tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan gender maskulin dan feminin. *Bissu* dikisahkan dengan mitos kosmogonik atau penciptaan alam semesta, dimana Dewa tidak bisa berkomunikasi

---

<sup>8</sup> Leonard Y. Andaya, *The Bissu: Study of a Third Gender in Indonesia*. Dalam buku Andrea Zamfira, Christian de Montlibert and Daniela Radu, *Gender in Focus, Identities, Codes, Stereotypes and Politics*, Barbara Budrich Publisher, Germany, 2018, hal 66.

dengan manusia. Kemudian Dewa mengutus *calabai* (laki-laki berwujud perempuan) dan sepanjang sejarah, individu-individu khusus ini ditempatkan oleh alam dan berfungsi di luar norma sosial, namun mereka tetap penting untuk berfungsinya sistem religi. *Bissu* memiliki fungsi spiritual dan hanya *calabai* tertentu yang bisa mengemban tugas sebagai *Bissu*. Menurut orang Bugis, menjadi *Bissu* adalah panggilan jiwa dan petunjuk dari dewata. Kesaktian *Bissu* tidak hanya terlihat saat ritual adat Bugis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap *Bissu* diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan masa lalu dan juga masa ke depan.



Foto 2  
Komunitas Waria

## Definisi dan Teori Transgender

Secara definitif, pengertian transgender adalah: *A person whose gender identity differs from the gender he or she was assigned at birth* (seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak dilahirkan)<sup>9</sup>. Transgender adalah kata yang mulai digunakan secara luas dalam beberapa dekade terakhir, dan maknanya masih dalam konstruksi sosial. Susan Stryker menggunakan istilah transgender untuk membatasi pengertian pada orang-orang yang penampilan dan tingkah lakunya sehari-hari berbeda dari konstruksi gender

yang dimiliki sejak lahir<sup>10</sup>. Sedangkan Kate Norman, merumuskan definisi transgender sebagai berikut<sup>11</sup>:

*A person whose self-identity does not correspond to the gender linked with their biological sex and/ or their initial gender role, or who experiences dysphoria in conforming to conventional notions of a male or female binary gender role.*

<sup>9</sup> Andrea Pelleschi, *Transgender rights and issues*. Abdo Publishing, Minnesota, 2016. hal 6.

<sup>10</sup> Susan Stryker, loc.cit

<sup>11</sup> Kate Norman. *Socialising Transgender: Support in transition*. Dunedin Academic Press, London, 2017. hal xiii

Definisi tersebut mengandung dua makna, pertama, identitas transgender selalu berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin atau keadaan biologis. Kedua, seseorang yang mengalami disforia<sup>12</sup> terhadap gagasan gender biner pria dan wanita.

Pengertian tentang kekuatan, status, dan ketidaksetaraan gender sangat relevan dengan pemahaman transgender, karena transisi orang transeksual cenderung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status mereka dengan orang lain. Namun, mungkin sulit untuk membedakan dengan jelas apakah perubahan status seperti itu merupakan konsekuensi pada peningkatan visibilitas sebagai orang transgender, atau terkait dengan status peran biner di luar biner laki-laki dan perempuan yang ditampilkan. Misalnya, orang yang ditransfisikan *Male to Female* mungkin menemukan status mereka berkurang atau ditanyai apakah mereka dianggap sebagai orang transgender dalam ruang bi-jender dan perempuan, atau mereka mungkin menemukan bahwa, jika mereka diterima sebagai seorang wanita, status yang mereka pegang ketika hidup sebagai manusia telah menderita sebagai konsekuensi dari transisi<sup>13</sup>.

Konstruksi sosial gender pada tingkat individu juga dapat diperluas ke gender dalam kelompok, dan ke area geografis tertentu yang dapat diidentifikasi adanya peran gender yang penting di wilayah tersebut. Maksud dari konstruksi sosial gender dapat diidentifikasi di suatu wilayah, misalnya di area wilayah Sumatera Barat, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi diantara peran gender lainnya. Karena di wilayah kebudayaan Minang, adat-istiadatnya berdasarkan sistem *matrilineal* yang menetapkan rantai ikatan

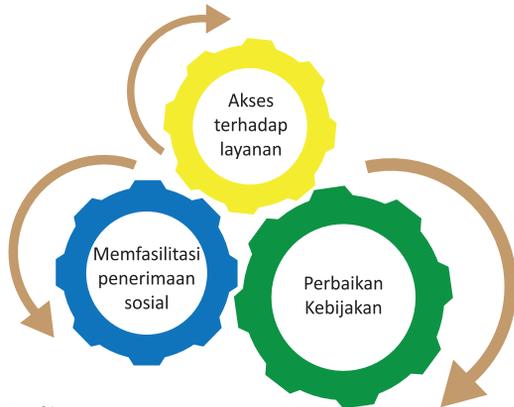
---

<sup>12</sup> Disforia adalah keadaan tidak tenang/gelisah atau ketidakpuasan yang mendalam. Dapat juga merujuk pada suatu keadaan yang tidak nyaman berada di dalam tubuh saat ini, dalam kasus disforia gender. Kebalikan dari disforia adalah eforia.

<sup>13</sup> Op.cit, hal 2-3

keluarga berdasarkan garis dari ibu. Demikian halnya dengan sejarah *Bissu* di wilayah suku Bugis, yang menduduki posisi sosial yang tinggi dibandingkan dengan warga yang lain.

Oleh sebab itu, untuk memahami persoalan yang dialami oleh Waria, perlu diidentifikasi latar budaya dimana waria tersebut bermukim. Bagi yang tinggal di kawasan yang memiliki latar budaya yang terbuka, maka akan memberikan ruang kenyamanan bagi kehidupan waria. Namun jika kondisi sosial dan budaya suatu daerah memiliki norma yang tertutup dan selalu merujuk kepada dogma agama, akan menimbulkan disforia bagi waria.



Grafik 1  
Bagan kerja program peduli

## Konsep Inklusi Dalam Program Peduli

Pada 27 Desember 2017, Program Peduli membuat diskusi untuk memahami inklusi sosial. Diskusi ini mengundang para pelaku Program Peduli, praktisi pembangunan dan siapa saja yang memiliki perhatian terhadap inklusi sosial. Meski tidak berambisi untuk menawarkan definisi dan kerangka kerja, diskusi ini mengacu pada praktik lapangan, *review* pustaka yang relevan dan kebijakan yang ada. Diskusi ini baru menyentuh pada bagian permukaan, diharapkan usaha ini terus berlanjut untuk memperluas pemahaman tentang penyebab, konsekuensi dan parameter mengenai inklusi sosial<sup>14</sup>.

Definisi inklusi sosial adalah sebagai berikut:

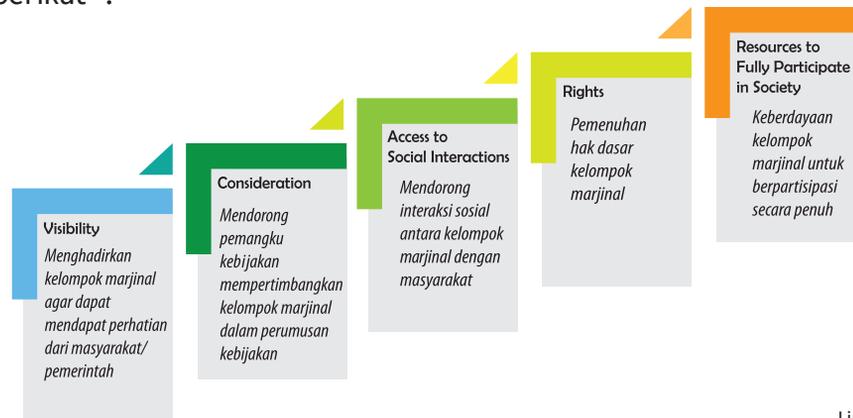
*Inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan<sup>15</sup>.*

<sup>14</sup> Inklusi Sosial, Sebuah pemikiran awal dari pengalaman Peduli, Hal 1

<sup>15</sup> Ibid. Hal 1

Definisi inklusi sosial di atas mencakup dua cara. *Pertama* adalah proses untuk memperbaiki persyaratan bagi kelompok marginal untuk ambil bagian (berpartisipasi penuh) dalam masyarakat. *Kedua*, proses untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan dan martabat kelompok-kelompok yang dipinggirkan karena identitasnya untuk mendapatkan rekognisi dan ambil bagian dalam masyarakat<sup>16</sup>. Melalui inklusi sosial, Program Peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Proses inklusi sosial di masyarakat, menurut Goran Therborn dapat melalui lima langkah secara hirarkis, diagramnya sebagai berikut<sup>17</sup>:



Grafik 2  
Lima Tahap Proses Inklusi Sosial

<sup>16</sup> Ibid. Hal 2-3

<sup>17</sup> *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration*, UNDESA 2009, Hal 14-15

*#DInklusif* adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marjinalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari<sup>18</sup>.

Program Peduli dirancang sebagai pembangunan yang berfokus pada kelompok yang dieksklusikan: tidak boleh ada yang ditinggalkan. Program Peduli akan memastikan tidak ada kelompok—*lepas dari perbedaan etnisitas, keyakinan, orientasi seksual, fisik tubuh, usia dan pandangan politik*—yang tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan<sup>19</sup>.

Inklusi sosial dapat diidentifikasi sebagai pengalaman sosial masyarakat yang berlangsung secara luas dan adanya partisipasi aktif, dengan persamaan kesempatan dan kesempatan hidup yang luas bagi individu dan tercapainya tingkat kesejahteraan bagi semua warga negara. Namun ketika di suatu daerah atau negara sudah tercapai inklusi sosial, tidak serta merta eksklusi sosial hilang sama sekali dan tidak ada diskriminasi serta stigmatisasi terhadap kelompok minoritas dan marjinal. Menurut Hilary Silver eksklusi sosial bukan lawan dari inklusi sosial, tidak ada proses “*zero-sum relationship*” atau hubungan yang saling menihilkan antara *social exclusion* dengan *social inclusion*. Kedua proses saling terkait dan dapat terjadi secara bersamaan<sup>20</sup>.

Contohnya di suatu kota, ada sekelompok waria (jumlahnya minoritas) mengalami eksklusi sosial pada seluruh aspek kehidupan yaitu relasi sosial, kependudukan, kesehatan, keluarga, ekonomi dan sebagainya.

18 [www.programpeduli.org](http://www.programpeduli.org) diakses 18 Mei 2020

19 Inklusi Sosial, Sebuah pemikiran awal dari pengalaman Peduli, Hal 1

20 Dirk-Jan Omtzigt. *Survey on Social inclusion: Theory and Policy*, Oxford University, 2009, hal 5

Namun pada saat yang sama sebagian besar penduduk di kota tersebut juga mengalami eksklusi di bidang ekonomi, karena banyak ditemukan penduduk yang miskin. Contoh lainnya, di suatu kota, waria diterima sebagai warga dalam hal pergaulan kemasyarakatan dan memperoleh dokumen kependudukan. Namun secara ekonomi, waria tersebut tidak mendapat akses penghidupan yang layak. Nasibnya sama seperti sebagian besar warga yang tidak mendapatkan akses hidup layak di bidang ekonomi.

Inklusi sosial biasanya terjadi karena kekuatan ikatan sosial dan khususnya ikatan keluarga, ditambah dengan berpenghasilan yang cukup. Proses penerimaan sosial seseorang atau kelompok kedalam lingkungan masyarakat menjadi anggota jaringan sosial, ekonomi dan budaya merupakan wujud pengakuan sebagai warga. Inklusi sosial adalah proses “menjadi” (*to be*) yang tidak pernah berhenti di ujung pencapaian, karena pada saat yang bersamaan proses eksklusi juga berjalan beriringan saling melemahkan satu dengan lainnya namun tidak bisa saling menihilkan<sup>21</sup>.

---

21 Dirk-Jan Omtzigt. *Survey on Social Inclusion: Theory and Policy*, Oxford University, 2009, hal 3

## LANDASAN HUKUM

Indonesia memiliki seperangkat aturan yang menjamin hak asasi warga negara akan dipenuhi. Hak yang diakui dan wajib dipenuhi negara adalah hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jaminan negara tersebut dituangkan kedalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6. UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
7. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23/2006 Administrasi Kependudukan



Gambar 1  
Surat Komitmen Bersama  
Pembentukan Rintisan Desa Inklusi Asri Mulya

Semua aturan di atas, tidak ada yang melarang waria untuk memperoleh pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, kependudukan, bantuan hukum dan sebagainya. Di depan hukum, waria memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Namun di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang dialami waria. Perangkat hukum sudah ada, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, profil waria yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan refleksi sekaligus evaluasi terhadap implementasi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan politik waria.

Berdasarkan pandangan sistem hukum, diperlukan tiga prasyarat sebuah aturan dapat diimplementasikan dengan baik. Syarat pertama adalah *content of law*, yaitu isi dari aturan tersebut memuat ketentuan yang mengutamakan keadilan sosial. Syarat kedua adalah *structure of law* yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan aturan tertulis tersebut berfungsi dengan baik dari pusat sampai ke daerah. Syarat ketiga, *culture of law* yaitu dukungan secara kultural dari masyarakat terhadap penegakan aturan tersebut. Jika salah satu syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka mustahil sebuah aturan bisa dilaksanakan.



TWB - BANJARATI

# PELANTIKAN



FKBI

KEPENGURUSAN "KAYUH HAMI"  
ORGANISAS WISATAWANJATI  
PERIODE 2015-2016



“ *Indonesia memiliki seperangkat aturan yang menjamin hak asasi warga negara akan dipenuhi. Hak yang diakui dan wajib dipenuhi negara adalah hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.* ”



## 02

# METODOLOGI

Program Peduli adalah kolaborasi antara pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung sebagai mitra untuk mendorong gerakan inklusi sosial. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat enam kelompok sasaran Program Peduli yang selama ini belum dapat mengakses program pembangunan, yaitu: (1) anak dan remaja rentan, (2) masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, (3) korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama, (4) orang dengan disabilitas, (5) hak asasi manusia dan restorasi sosial, serta (6) waria<sup>1</sup>.

PKBI sebagai salah satu mitra payung Program Peduli, mengemban tugas untuk menerapkan pendekatan inklusi sosial kepada kelompok waria. Setelah pendekatan inklusi sosial dilaksanakan maka dilaksanakan penelitian untuk memperoleh profil waria di lokasi program peduli.

---

<sup>1</sup> [www.programpeduli.org](http://www.programpeduli.org) diakses 18 Mei 2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung pada tahun 2018 dengan jumlah responden 96 waria menggunakan metode kombinasi atau *mix method*. Metode kuantitatif dilakukan dengan teknik *survey*, yaitu menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup. Kuesioner kemudian dibagikan kepada waria di kota masing-masing dan diisi secara mandiri atau *self-completed questionnaire* selanjutnya dikembalikan ke peneliti.

Sedangkan metode kualitatif dilaksanakan dengan teknik *photovoice* dengan tujuan menggali makna dari sudut pandang atau lensa waria. Peneliti memfasilitasi pemetaan kebutuhan waria, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun pertanyaan survei kehidupan waria, yang dinisiasi oleh rekan-rekan waria sendiri di daerahnya masing-masing. Dari hasil tersebut disusun pertanyaan yang digunakan untuk topik *photovoice*, yaitu tentang rumah, keluarga, yang paling berharga, makna peduli dan gambaran diri. Teknik *photovoice* merupakan teknik seperti *story telling* yang memberikan kebebasan kepada informan atau narasumber menyampaikan pendapat dan pandangannya tanpa dibatasi oleh peneliti. Persepsi dan penilaian informan mengenai dirinya dan pandangan terhadap lingkungannya merupakan respon yang otentik.

## LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu:

1. Aceh
2. Sumatera Selatan
3. DKI Jakarta
4. Sulawesi Selatan
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Tengah
7. Jawa Barat
8. DI Yogyakarta

## ANALISA DATA

Analisa data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan koding data pada aplikasi *MsExcel*. Kemudian data diolah dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Hasil dari kategori ditabulasi silang antar data kategori tersebut. Tujuannya untuk melihat korelasi satu kategori terhadap kategori data lainnya.

Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi jawaban informan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Uraian penjelasan dari persepsi informan yang dianggap mewakili suara waria akan dijadikan kutipan utama untuk memperkuat data kuantitatif.



## 03

## PROFIL WARIA



Foto 3

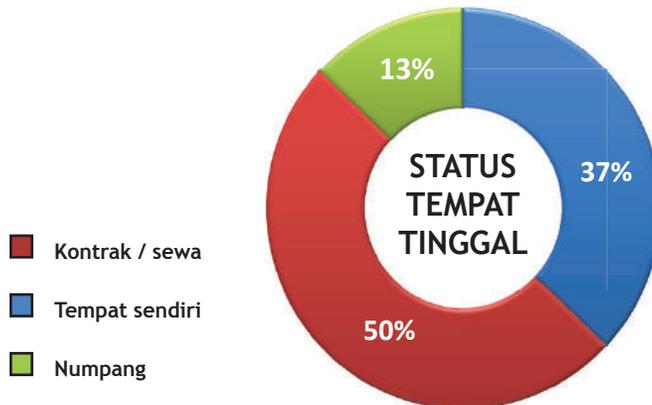
Komunitas Waria dalam kegiatan program peduli

Hasil pengolahan data dan pengelompokan kategori (koding) ditemukan beberapa isu penting yang perlu ditampilkan dalam profil waria. Berikut adalah hasil pengelompokan data dan tabulasi silang data kuantitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan narasi kualitatif yang diperoleh melalui pengumpulan informasi menggunakan metode *photovoice*.

## TEMPAT TINGGAL DAN KELUARGA

### Hubungan Status Tempat Tinggal dengan Penerimaan Sebagai Waria

Diagram di bawah ini menjelaskan status tempat tinggal yang sekarang ditempati sebagai rumah. Ada tiga kategori tempat tinggal, *pertama*, rumah pribadi adalah rumah yang dimiliki sendiri oleh Waria dan atau dimiliki oleh orang tua dan Waria tinggal bersama keluarga di dalam rumah tersebut. *Kedua*, kontrak atau sewa adalah rumah yang dikontrak atau sewa berupa kos-kosan yang ditempati oleh Waria sendiri. *Ketiga*, numpang adalah rumah yang ditumpangi oleh waria untuk dijadikan tempat tinggal, bisa numpang dengan saudara (bukan orang tua) atau numpang dengan teman.

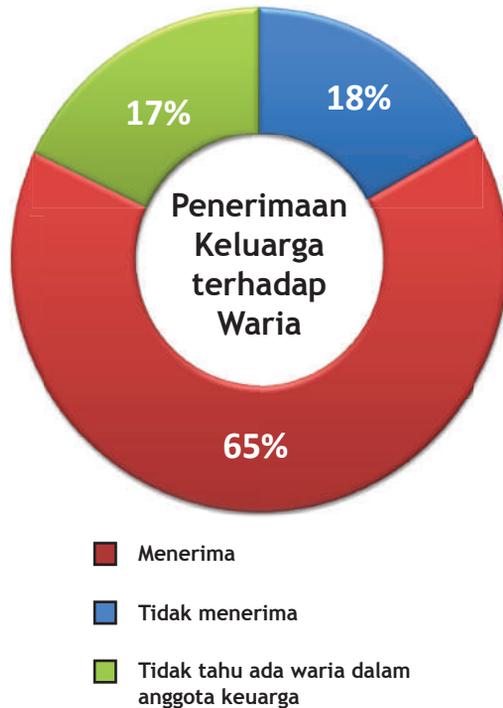


Grafik 3

Waria separuhnya (50%) bertempat tinggal dengan cara kontrak, sewa atau kos.

Waria yang tinggal di rumah sendiri bersama keluarga atau rumah pribadi 37%.

Sedangkan yang numpang kepada teman atau saudara jumlahnya 13%.

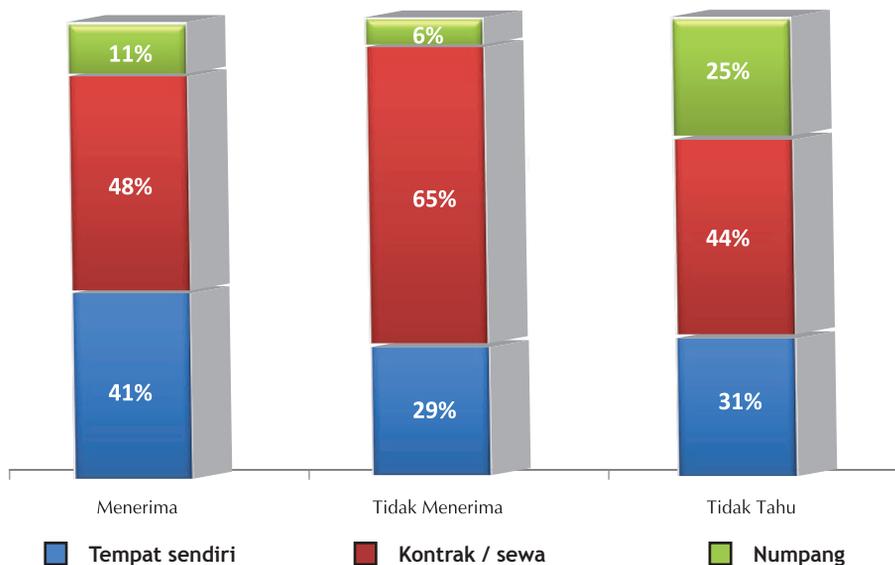


*Grafik 4*  
 Waria diterima oleh keluarga sebanyak **65%**, sedangkan yang tidak diterima oleh keluarga ada **18%**. Sebanyak **17%**, keluarga tidak tahu bahwa ada anggota keluarganya sebagai waria.



*Foto 4*  
 Kebersamaan anggota HW MKGR Sumsel dengan orang tua/keluarga

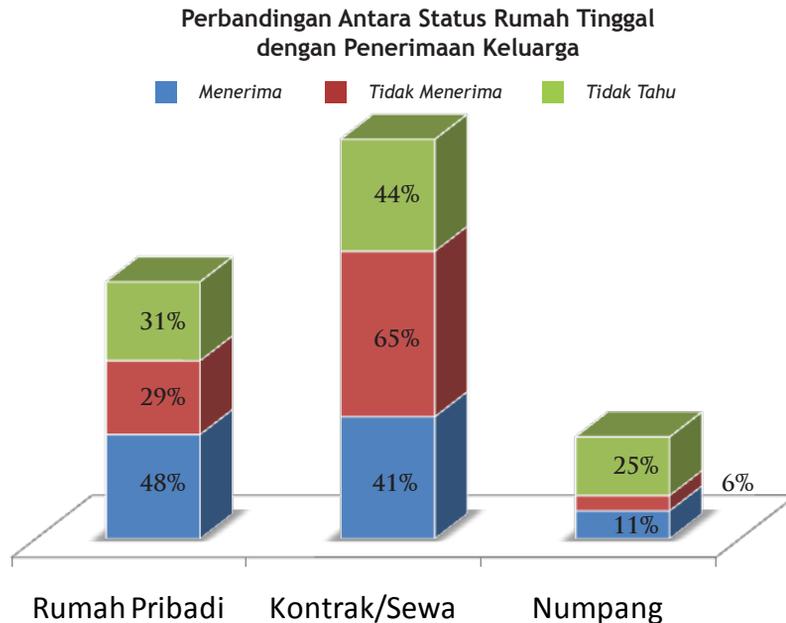
## Status Tempat Tinggal dengan Penerimaan Keluarga



Grafik 5

Waria yang diterima oleh keluarga ada 65%, dan dari jumlah tersebut ternyata ada 41% yang tinggal di rumah pribadi, 48% tinggal dikontrakan atau sewa kos-kosan. Ada 11% waria yang diterima keluarga tetapi numpang di rumah saudara atau teman. Sementara Waria yang tidak diterima oleh keluarga ada 18%, dari jumlah tersebut, 29% nya tinggal di rumah pribadi, 65% tinggal di rumah kontrakan, sewa atau kos. Sisanya sebanyak 6% Waria yang diterima keluarga hidupnya numpang di rumah saudara atau teman. Keluarga yang tidak tahu bahwa ada anggota keluarga yang menjadi Waria sebanyak 17%. Dari jumlah tersebut, ada 31% yang tinggal di rumah pribadi dan ada 44% yang kontrak rumah, sewa atau kos. Sedangkan sisanya yang 25% tinggalnya numpang di rumah saudara atau teman.

Secara umum, apapun status tempat tinggal waria saat ini, apakah dia tinggal di rumah sendiri, kontrak, sewa, kos atau numpang, 65% keluarganya menerima keadaan sebagai waria. Hanya 18% keluarga yang menolak keberadaan anggotanya yang waria. Sisanya 17% keluarga tidak tahu kalau anggotanya ada yang menjadi waria. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



*Grafik 6*

Dari grafik ini dapat diketahui bahwa yang memiliki rumah pribadi, lebih banyak diterima keluarga sebagai waria. Sedangkan yang kontrak/sewa, lebih banyak yang ditolak oleh keluarga sebagai waria. Bagi waria yang numpang, keluarganya sebagian besar tidak tahu kalau anggota keluarganya ada yang menjadi waria.

*Rumah yang aman bukan rumah yang disediakan oleh pemerintah, atau yang disediakan oleh orang lain. Tapi tempat yang bisa dijadikan tempat kumpul bersama teman-teman komunitas*

*[Citra, Aceh]*

Tempat tinggal bagi waria menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena sebagian besar terutama di Jakarta dan Sulawesi Selatan (Makassar), banyak waria yang tinggal terpisah dari orang tuanya. Bagi yang kontrak atau sewa/kos, sebagian kecil waria merasa kesulitan ketika mencari tempat tinggal. Makna tempat tinggal bagi waria terekam dari *photovoice* berikut ini:



Foto 5  
Potret Waria dan keluarganya dalam Forum Keluarga

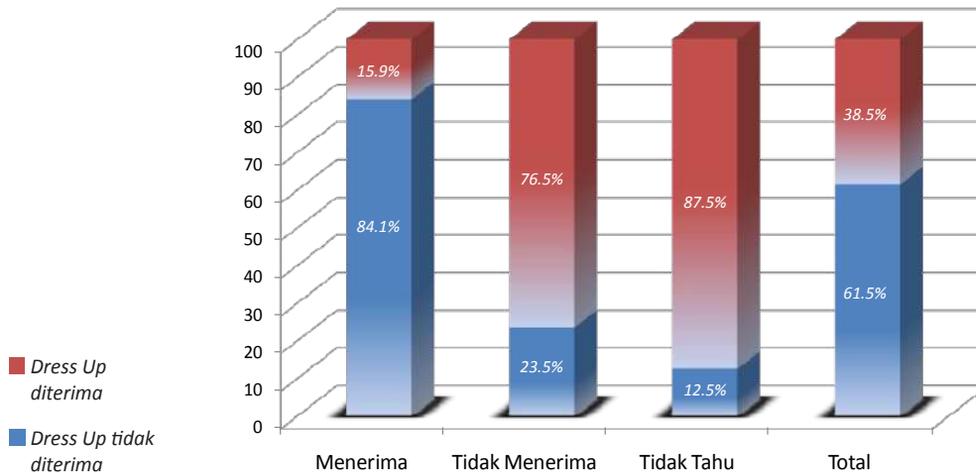
*Ini kakek nenekku.  
Aku tidak tinggal  
bersama orang  
tua tetapi tinggal  
bersama mbah.  
Mbahku inilah  
yang menjadi  
semangat  
hidup aku.  
[Keket, Kalsel]*



*Foto 6*  
Potret keluarga Waria di Kalimantan Selatan

## Hubungan Penerimaan Waria oleh Keluarga dengan *Dress Up*

Grafik di bawah ini menjelaskan bahwa keluarga yang menerima anaknya menjadi waria, 84,1% mudah menerima anaknya berdandan atau (*dress up*) menggunakan pakaian perempuan. Ada keluarga yang menerima keadaan anaknya menjadi waria, tetapi tidak menerima kalau anaknya berdandan menggunakan pakaian perempuan.



Grafik 7  
Data penerimaan keluarga dengan *Dress up*

*Keluarga memiliki dampak yang besar untuk kehidupan waria. Pengalaman terkait penerimaan dan dukungan keluarga memiliki pengaruh yang mendalam. Salah satunya berdampak pada kesehatan fisik dan mental.*

Sedangkan keluarga yang tidak menerima waria, dua pertiganya juga tidak menerima kalau penampilannya seperti wanita (*dress up*). Namun ada hal yang menarik pada keluarga yang tidak menerima waria, masih ada sepertiga yang menerima *dress up*. Demikian juga dengan keluarga yang tidak tahu bahwa ada anggotanya waria, dua pertiga menolak jika ada yang *dress up*, sepertiganya bisa menerima jika ada yang *dress up* di dalam keluarganya.

Secara umum, 61,5% lebih keluarga yang menerima waria, juga dapat menerima *dress-up*. Sisanya 38,5% keluarga yang tidak menerima dan tidak tahu anggota keluarganya ada yang waria, juga menolak kalau waria *dress up* di dalam keluarga.



Foto 7

Pentingnya penerimaan keluarga bagi kehidupan waria



*Keluarga adalah ...sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah ataupun tidak dimana kita bisa merasa aman, nyaman, terlindungi dan diayomi yang didalamnya ada rasa saling menghargai, menghormati dan saling mensupport satu sama lain.*

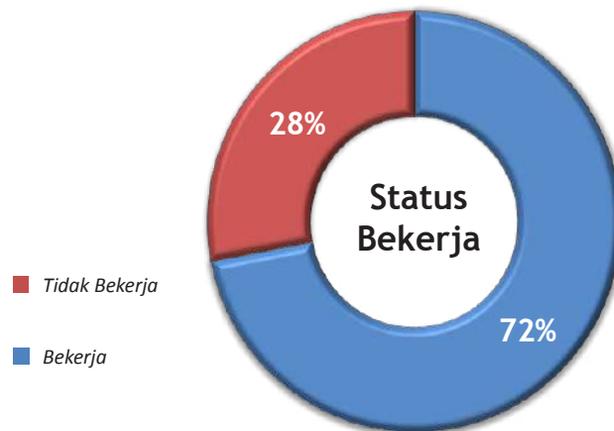
Foto 8

Komunitas waria dan keluarga dalam sebuah kesempatan berkumpul di Bali

## PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

### Status dan Jenis Pekerjaan

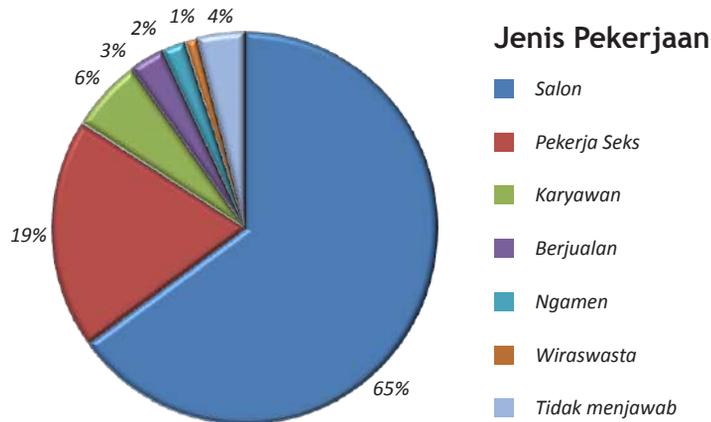
Pekerjaan sangat penting bagi semua orang untuk mampu mendukung diri mereka sendiri dan keluarga. Hanya saja, keterbatasan akses pendidikan berdampak pada keterbatasan akses pekerjaan, ditambah diskriminasi struktural membuat waria kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan serta penghidupan yang layak. Berdasarkan *survey* mengenai status pekerjaan dan jenis pekerjaan saat ini, data di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar waria mengaku bekerja.



Grafik 8  
Perbandingan jumlah waria yang memiliki status bekerja dan tidak bekerja

Waria sebagian besar bekerja, ada 72% yang bekerja dan memiliki penghasilan bulanan. Namun ada 28% yang mengatakan tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan yang digeluti oleh waria sebagian besar adalah bekerja di salon sebanyak 65%. Sebanyak 19% waria mengaku bekerja sebagai pekerja seks. Namun ada juga yang menjadi karyawan sebanyak 6%. Sedangkan yang mengaku berjualan ada 3% rata-rata berjualan kue. Sisanya menjadi pengamen 2% dan wiraswasta 1%. Ada juga waria yang tidak menjawab jenis pekerjaannya meskipun mengaku memiliki penghasilan.

Berdasarkan data di atas pilihan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh waria sangat terbatas. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kecantikan seperti salon lebih dominan dibandingkan pekerjaan yang mengandalkan ijazah pendidikan formal seperti menjadi karyawan atau pegawai negeri.



Grafik 9  
Berbagai jenis profesi/pekerjaan yang dipilih waria

## Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Penghasilan

Berdasarkan jenis pekerjaan, dapat digambarkan berapa penghasilan per bulan yang diperoleh waria. Pekerjaan di salon merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh waria, sebanyak 47% yang bekerja di salon, mengaku memperoleh penghasilan 1 - 5 juta rupiah per bulan. Sebanyak 35% mengaku mendapat penghasilan sebanyak 500 ribu - 1 juta rupiah per bulan. Sisanya 13% mengaku hanya mendapat penghasilan di bawah 500 ribu.



Foto 9

Tata Rias, salah satu profesi/pekerjaan yang paling banyak dipilih oleh waria

Penghasilan yang diperoleh dari pekerja seks, sebagian besar 54% berkisar antara 500 ribu sampai 1 juta. Tetapi ada juga pekerja seks waria yang memperoleh pendapatan 1-5 juta per bulan. Penghasilan sebagai pekerja seks yang di bawah 500 ribu hanya 8%.

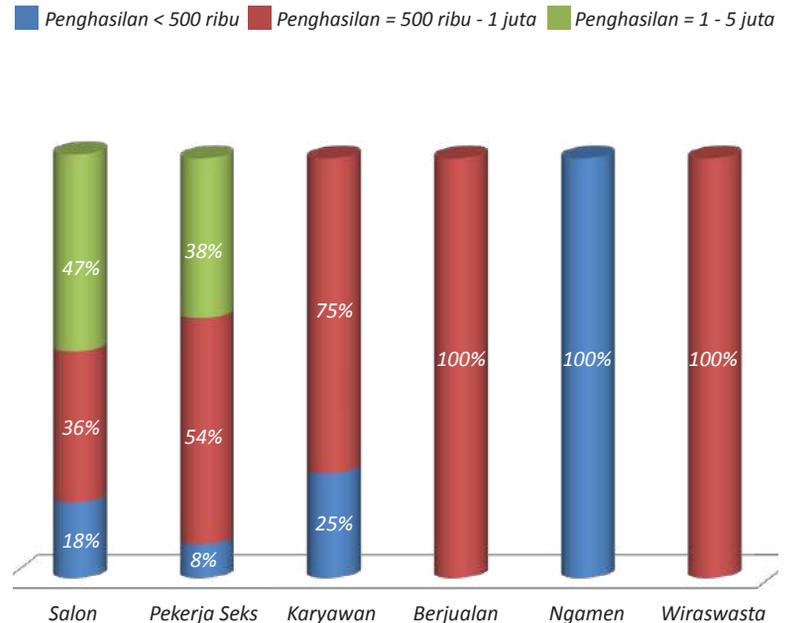
Penghidupan yang layak dinikmati oleh waria yang bekerja sebagai karyawan swasta. Karena 75% mendapatkan penghasilan di atas 1 juta per bulan. Ada 25% yang menerima gaji antara 500 ribu

sampai 1 juta per bulan. Jika bekerja sebagai karyawan, tidak ada yang memperoleh gaji di bawah 500 ribu per bulan.

Waria yang berdagang dan berwiraswasta, penghasilannya semua diantara 500 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan. Sedangkan jika menjadi pengamen, hanya mendapatkan penghasilan di bawah 500 ribu.

Pekerjaan dan kehidupan yang layak ternyata berhubungan sangat erat. Waria yang hidup layak dapat dilihat dari pekerjaan dan jumlah penghasilan. Dari enam jenis pekerjaan hanya yang menjadi karyawan dan bekerja di salon yang dapat dianggap lebih cukup penghasilannya. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya terdapat variasi pendapatan dari mulai yang dibawah 500 ribu sampai yang di atas 1 juta.

## Penghasilan per Bulan



Grafik 10

Rata-rata penghasilan per bulan berdasarkan pilihan pekerjaan/profesi yang dijalani oleh waria

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

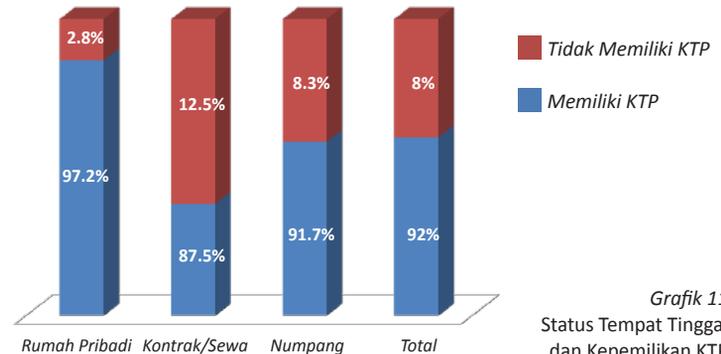


Foto 10  
Waria di Palembang memperoleh e-KTP dan BPJS Kesehatan

### Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Secara keseluruhan, waria sebagian besar sudah memiliki KTP yaitu 92% berbanding yang tidak mempunyai KTP hanya 8%. Perlu dikaji lebih dalam mengapa waria yang kontrak atau sewa jika dibandingkan lainnya, yang tidak memiliki KTP di atas 10%.

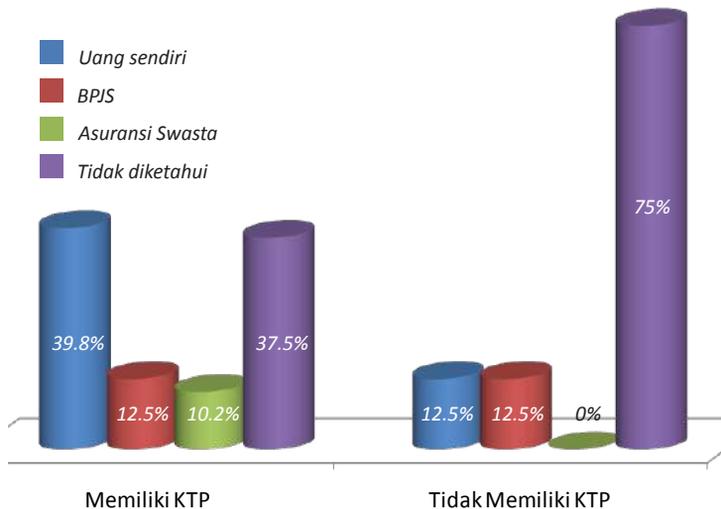
Salah satu indikator pemenuhan hak sipil warga negara adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen identitas lainnya seperti kartu keluarga, surat ijin mengemudi, BPJS, akta kelahiran dan *passport*. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada identitas KTP dan BPJS. Kedua identitas penduduk tersebut sangat berguna untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar warga negara termasuk hak dasar waria.



Grafik 11  
Status Tempat Tinggal dan Kepemilikan KTP

## Kepemilikan KTP dengan Asuransi Kesehatan

Kepemilikan KTP tidak selalu berkorelasi dengan kepemilikan kartu asuransi kesehatan yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan gratis. Waria memiliki kebebasan untuk memilih jenis asuransi kesehatan. Kebebasan tersebut terlihat dari variasi pilihan asuransi kesehatan. Pilihannya untuk mendapatkan layanan kesehatan, ada yang menggunakan uang sendiri artinya waria tersebut bayar langsung setelah mendapat layanan kesehatan. Pilihan kedua adalah menjadi anggota BPJS dengan membayar iuran maupun menjadi anggota yang disubsidi oleh pemerintah atau di dalam istilah BPJS disebut PBI (Penerima Bantuan Iuran). Ketiga, adalah menggunakan asuransi swasta. Di dalam penelitian ini ternyata ada juga waria yang tidak diketahui status kepemilikan asuransi kesehatan.



membayar iuran maupun menjadi anggota yang disubsidi oleh pemerintah atau di dalam istilah BPJS disebut PBI (Penerima Bantuan Iuran). Ketiga, adalah menggunakan asuransi swasta. Di dalam penelitian ini ternyata ada juga waria yang tidak diketahui status kepemilikan asuransi kesehatan.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan kepesertaan waria di dalam asuransi kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan .

Grafik 12  
Status Tempat Tinggal dan Kepemilikan KTP dan Asuransi Kesehatan

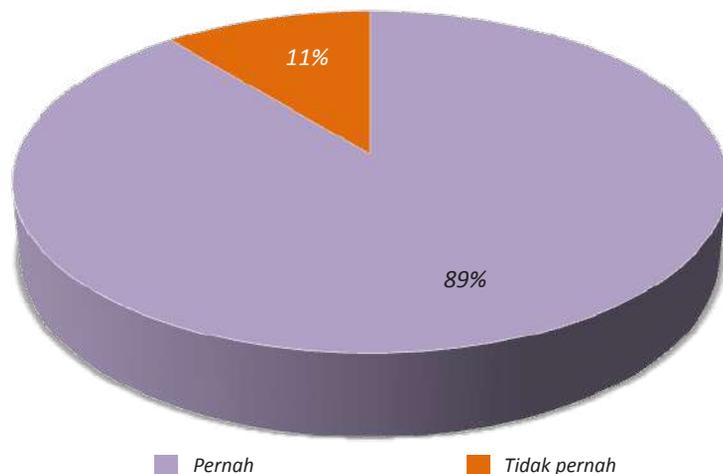
Waria yang memiliki KTP, tidak semuanya menjadi peserta asuransi kesehatan. Hanya 12,5% yang menjadi peserta asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah. Ada 39,8% waria yang menggunakan uang sendiri setiap pemeriksaan kesehatan. Ada juga yang memiliki asuransi swasta. Namun yang disayangkan adalah ada 37,5% yang memiliki KTP tetapi tidak diketahui status kepesertaan asuransi kesehatan.

Sementara waria yang tidak memiliki KTP sebagian besar 75% tidak diketahui status kepesertaan asuransinya. Ada 12,5% yang menggunakan uang sendiri untuk mendapatkan layanan kesehatan, jumlahnya sama dengan waria yang tidak memiliki KTP tetapi tercatat sebagai peserta asuransi kesehatan BPJS atau yang disediakan pemerintah. Yang tidak memiliki KTP, tidak ada yang menjadi anggota asuransi swasta.

## PELAYANAN KESEHATAN

### Status Akses Layanan Kesehatan

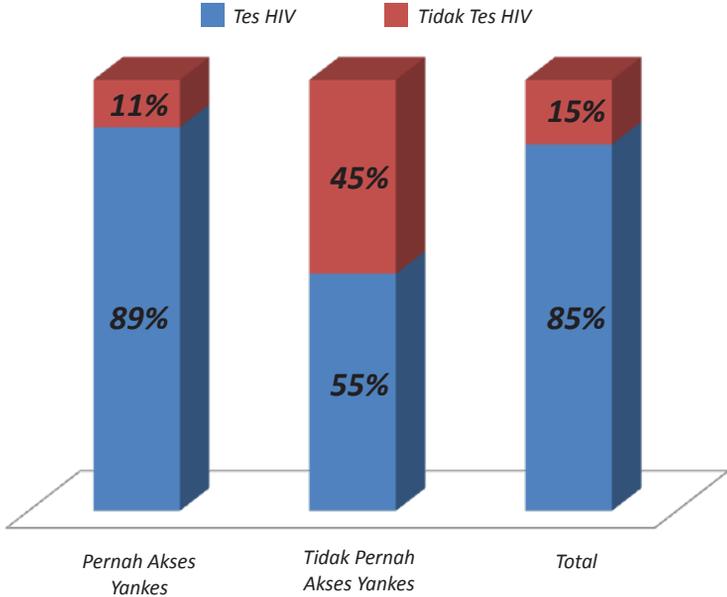
Sebagian besar waria pernah mengakses layanan kesehatan yaitu sebanyak 89%. Sisanya 11% tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa waria memiliki kesadaran untuk memelihara kesehatannya seperti terlihat di dalam grafik berikut:



Grafik 13  
Status Waria mengakses layanan kesehatan

## Akses Pelayanan Kesehatan dengan Tes HIV

Data hubungan yang pernah mengakses layanan kesehatan dengan status sudah tes atau tidak tes HIV dijelaskan grafik berikut:



Terdapat 11% waria yang pernah mengakses layanan kesehatan tetapi belum melakukan tes HIV. Sementara waria yang tidak mengakses layanan kesehatan, ada yang sudah pernah di tes HIV sebanyak 55%. Tes HIV yang dilaksanakan secara *mobile*, tidak memberatkan waria, karena waria tidak perlu berkunjung ke Puskesmas atau Rumah sakit. Biasanya tes HIV dilaksanakan di lingkungan tempat kerja waria atau tempat *nongkrong*. Secara keseluruhan, 85% waria sudah melakukan tes HIV, sisanya 15% belum di tes HIV

Grafik 14  
Hubungan antara akses layanan kesehatan dengantes HIV

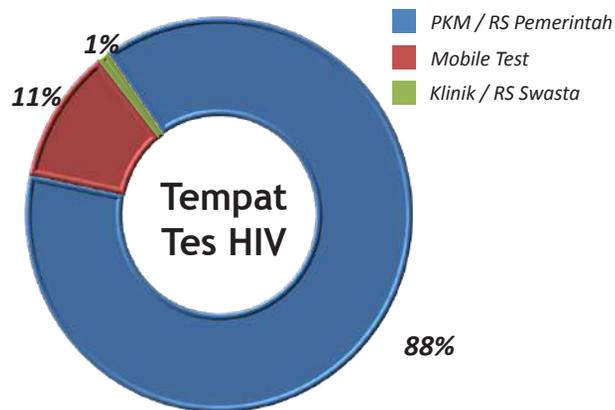
## Tempat Tes HIV

Waria paling banyak melakukan tes HIV di Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah. Hal tersebut berhubungan erat dengan program penanggulangan HIV dan AIDS, saat ini masih dikelola pemerintah menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan luar negeri.

Ada 1% waria yang mandiri untuk tes HIV di Klinik atau Rumah Sakit Swasta. 88% waria memanfaatkan program penanggulangan AIDS dengan mengakses tes HIV di Puskesmas dan RS pemerintah. 11% waria mengandalkan program *mobile* klinik tes HIV untuk mendapatkan layanan tes HIV.



Foto 11  
Layanan tes HIV di salah satu puskesmas bagi waria di Kota Palembang



Grafik 15  
Perbandingan jumlah waria yang melakukan Tes HIV berdasarkan tempat/fasilitas melakukan Tes HIV



Foto 12  
Putri Waria dalam Kontes Ratu Kecantikan

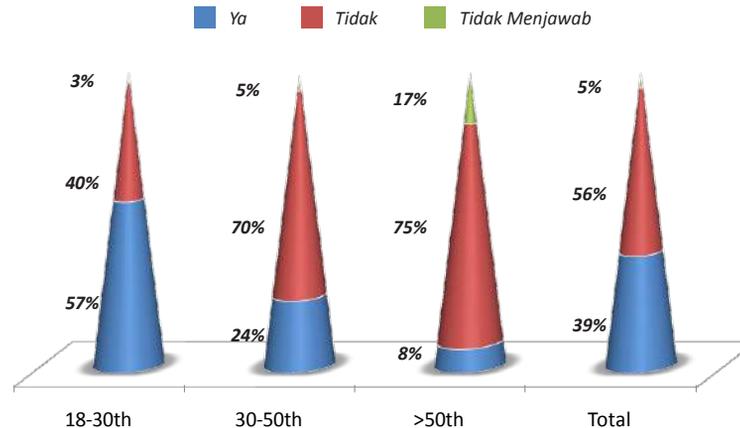
## PENYESUAIAN TUBUH

Identitas transgender yang selalu ingin diekspresikan berbeda dengan jenis kelamin atau keadaan biologis asalnya. Hal ini menimbulkan perasaan disforia yaitu keadaan tidak tenang/gelisah atau ketidakpuasan yang mendalam. Keadaan yang merujuk pada suatu keadaan tidak nyaman berada di dalam tubuh saat ini. Oleh sebab itu ada keinginan di kalangan waria untuk mengubah atau menyesuaikan bentuk tubuhnya sehingga terlihat seperti perempuan sebagaimana keadaan jiwanya. Namun tidak semua waria menginginkan penyesuaian bentuk tubuh agar tubuhnya secara ideal menjadi perempuan. Dari hasil penelitian lapangan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut.

## Perubahan Bentuk Tubuh

Waria usia 18-30 tahun yang menginginkan perubahan bentuk tubuh sebanyak 57%, yang tidak menginginkan perubahan ada 40% dan yang tidak menjawab ada 3%. Kelompok usia 30-50 tahun lebih banyak yang tidak menginginkan perubahan tubuh sebesar 70%, sedangkan yang menginginkan perubahan tubuh hanya 24%. Pada kelompok usia di atas 50 tahun lebih banyak yang tidak menginginkan perubahan tubuh ada 75%, yang ingin perubahan tubuh ada 8%, sisanya 17% tidak menjawab.

Secara keseluruhan sebagian besar waria tidak ingin perubahan tubuh jumlahnya 56%, yang ingin perubahan tubuh hanya 39%. Sisanya 5% waria tidak memberikan jawaban. Grafik di atas menggambarkan bahwa perasaan disforia di kalangan waria pada setiap kelompok selalu ada. Perbedaannya adalah besaran dari tiap kelompok usia, semakin muda semakin kuat dorongan untuk mengubah tubuh. Sebaliknya semakin tua, semakin berkurang keinginan mengubah tubuh.



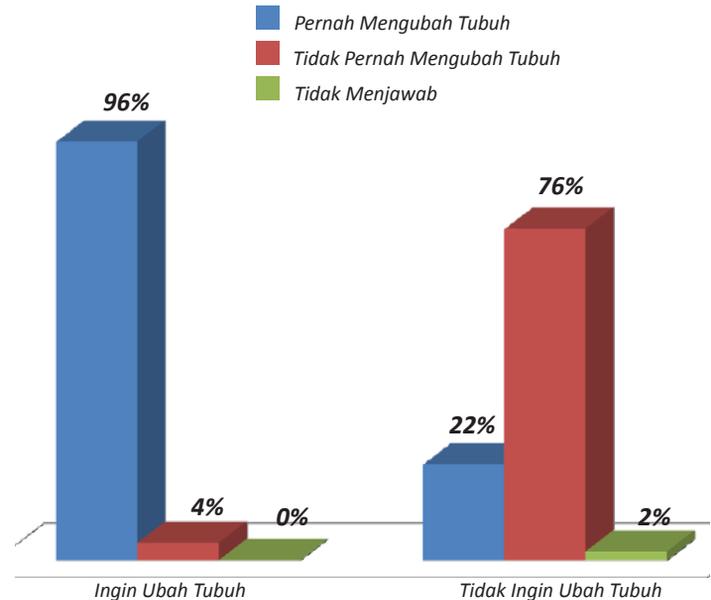
Grafik 16

Hubungan antara Usia dengan Keinginan Mengubah Tubuh

## Keinginan Ubah Tubuh dengan Kenyataan Pernah Ubah Tubuh

Dorongan keinginan untuk mengubah tubuh di kalangan waria merupakan fenomena yang lazim diketahui. Kebanyakan waria pada usia muda memiliki keinginan untuk mengubah tubuhnya. Namun tidak semua keinginan tersebut terlaksana. Data di samping ini menunjukkan hubungan antara keinginan mengubah tubuh dengan fakta pernah melakukan upaya untuk mengubah tubuh.

Ada 96% waria yang ingin mengubah tubuh, akhirnya benar-benar mengubah tubuhnya. Sisanya 4% keinginan tersebut hanya sebatas keinginan, tidak pernah mengubah tubuh. Sedangkan yang tidak punya keinginan mengubah tubuh, mengaku pernah mengubah tubuhnya sebanyak 22%. Sisanya 76% waria benar-benar tidak punya keinginan mengubah tubuh dan tidak pernah melakukan perubahan tersebut.



Grafik 17  
Perbandingan antara Keinginan mengubah tubuh dengan fakta mengubah tubuh



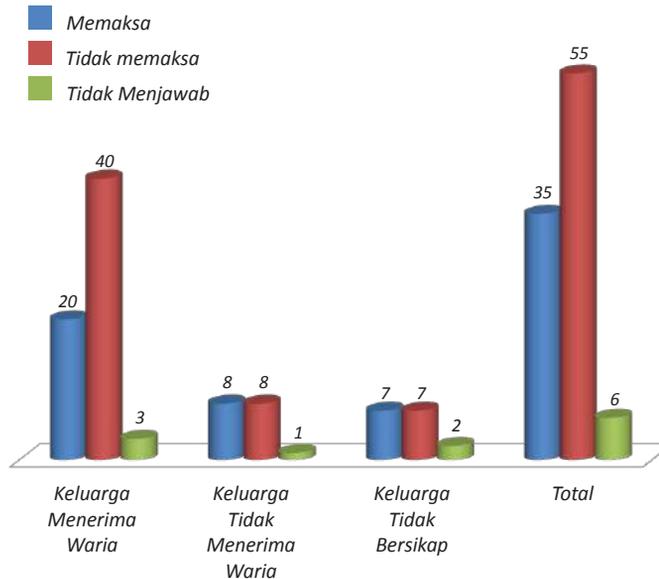
Foto 13  
Waria dalam keluarga

## Pemaksaan Identitas Gender

Keluarga mengharapkan anggotanya berperilaku sebagaimana jenis kelaminnya. Namun kenyataan, terdapat keragaman ekspresi di setiap individu dan kelompok yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Reaksi keluarga yang melihat ada perbedaan tersebut juga beragam. Ada keluarga yang bisa menerima perbedaan ekspresi, dan ada juga keluarga yang tidak bisa menerima. Bagi keluarga yang tidak menerima perbedaan ekspresi yang berbeda, ada yang memaksa waria untuk kembali ke identitas gendernya. Namun ada juga yang tidak memaksa. Di samping ini adalah data yang menghubungkan antara penerimaan keluarga terhadap waria dengan pemaksaan kembali ke identitas awal sesuai jenis kelaminnya.

Keluarga yang menerima waria ada yang memaksa waria menjadi laki-laki, jumlahnya 20 (32%) keluarga. Keluarga yang konsisten dengan sikap menerima waria dan tidak memaksa untuk menjadi laki-laki jumlahnya lebih banyak yaitu 40 (63%) keluarga. Di kalangan keluarga yang tidak menerima waria,

### Hubungan Penerimaan Keluarga dengan Pemaksaan Identitas Laki-laki



Grafik 18  
 Hubungan penerimaan keluarga dengan pemaksaan identitas gender pada waria

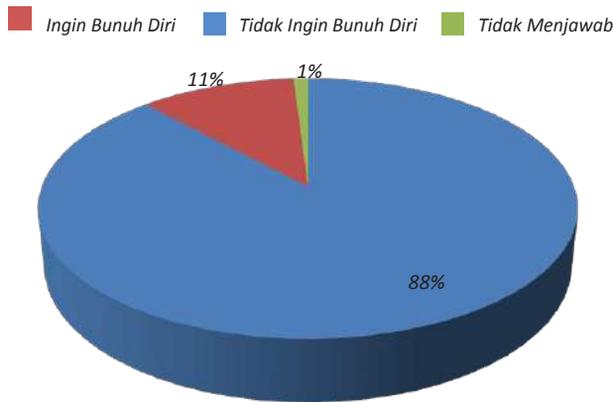
ternyata antara yang memaksa menjadi laki-laki dan yang tidak memaksa jumlahnya sama yaitu 8 keluarga (47%). Demikian halnya dengan keluarga yang tidak bersikap terhadap waria, keluarga tersebut ada yang memaksa dan tidak memaksa waria menjadi laki-laki, jumlahnya sama yaitu 7 keluarga (44%).

Secara keseluruhan, jumlah keluarga yang tidak memaksa adalah 55 keluarga atau 57,3%, sedangkan yang memaksa waria agar menjadi laki-laki sebanyak 35 keluarga atau 36,5%. Sisanya 6 (6,2%) keluarga tersebut tidak bersikap dan tidak menjawab perihal paksaan menjadi laki-laki. Cara pemaksaan waria agar menjadi laki-laki adalah dengan memaksa menikah dengan perempuan. Namun fenomena paksaan menikah tidak menunjukkan data yang signifikan. Sehingga tidak bisa disebut sebagai gejala umum tentang reaksi keluarga yang mengharapkan waria menjadi laki-laki.

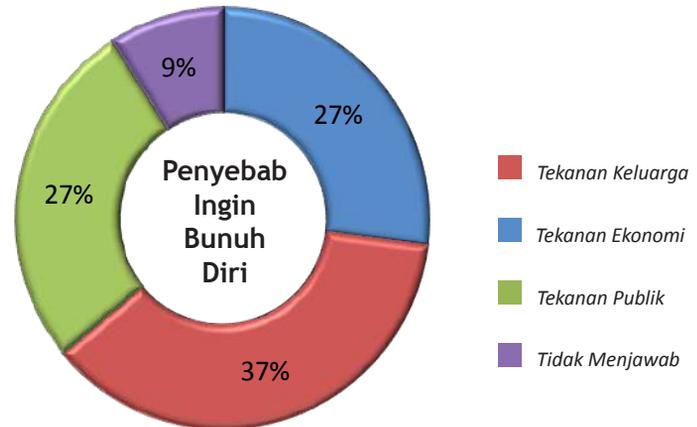
## Keinginan Bunuh Diri

Paksaan keluarga terhadap waria untuk berubah menjadi laki-laki atau berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya menimbulkan tekanan psikis bagi waria. Tekanan psikis lainnya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak layak yang disebabkan oleh status pendidikan dan status orientasi gender yang berbeda dengan konstruksi biner gender. Akibat tekanan psikis tersebut, timbul keinginan untuk bunuh diri di kalangan waria.

Data di bawah ini menggambarkan kondisi waria yang ingin bunuh diri.



Grafik 19  
Keinginan Bunuh Diri



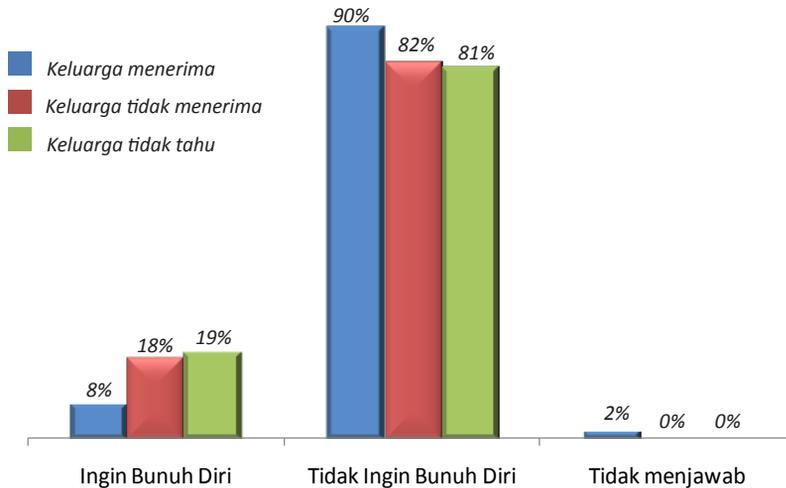
Grafik 20  
Berbagai faktor penyebab timbulnya dorongan/keinginan untuk bunuh diri pada waria

Pada umumnya waria tidak ingin bunuh diri, terbukti ada 88% yang tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Memang ada 11% waria yang ingin bunuh diri. Sisanya 1% waria tidak memberikan jawaban tentang masalah bunuh diri.

Faktor yang menyebabkan waria ingin bunuh diri adalah, 37% disebabkan oleh tekanan keluarga, seperti pemaksaan mengubah identitas jadi laki-laki atau paksaan menikah. Faktor ekonomi seperti sulitnya mendapat pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dan faktor tekanan publik berupa persekusi dan kekerasan publik terhadap waria, menyumbang 27% alasan waria ingin bunuh diri. Ada 9% waria yang tidak memberikan alasan mengapa ingin bunuh diri.

## Hubungan Penerimaan Keluarga dengan Keinginan Bunuh Diri

Siapa sebenarnya yang ingin bunuh diri? Data menyebutkan ternyata yang lebih banyak ingin bunuh diri adalah waria yang keluarganya tidak tahu menahu tentang status waria anaknya. Data tersebut dapat dilihat di bawah ini:



Grafik 21  
Hubungan Penerimaan Keluarga dengan Keinginan Bunuh Diri

Meskipun jumlah waria yang ingin bunuh diri karena keluarga tidak tahu dirinya waria jumlahnya hanya 19%, namun ini menunjukkan kerentanan psikis yang berat. Keluarga yang tidak menerima waria menyebabkan 18% waria dari keluarga tersebut ingin bunuh diri. Keluarga yang menerima waria, masih ada waria yang ingin bunuh diri yaitu sebesar 8%. Mayoritas waria tidak ingin bunuh diri angkanya 80% - 90% dan tidak terpengaruh oleh latar belakang penerimaan keluarga. Namun angka ingin bunuh diri yang berkisar 8% - 20% merupakan angka yang cukup signifikan.

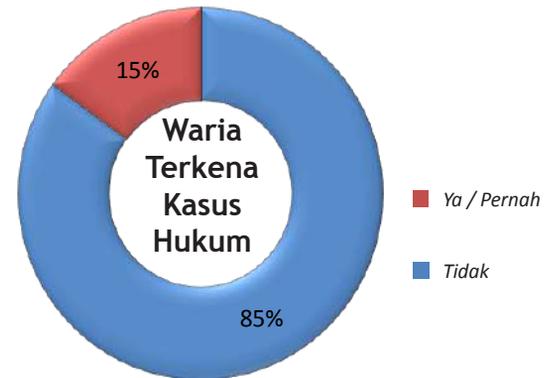
## KASUS HUKUM

Waria termasuk kelompok yang rentan berhadapan dengan hukum. Selain menjadi korban kejahatan berupa kekerasan berbasis gender, pemukulan, pengeroyokan sampai dengan korban pembunuhan. Waria juga yang pernah menjadi pelanggar hukum. Di bawah ini gambaran kasus hukum pada kelompok waria.

Berdasarkan pengakuan waria, tercatat 15% pernah berhadapan dengan hukum. Sisanya 85% belum pernah berperkara dengan pihak penegak hukum. Melihat prosentasenya termasuk jumlah yang besar jika ada 100 waria, 15 diantaranya pernah berhadapan dengan hukum



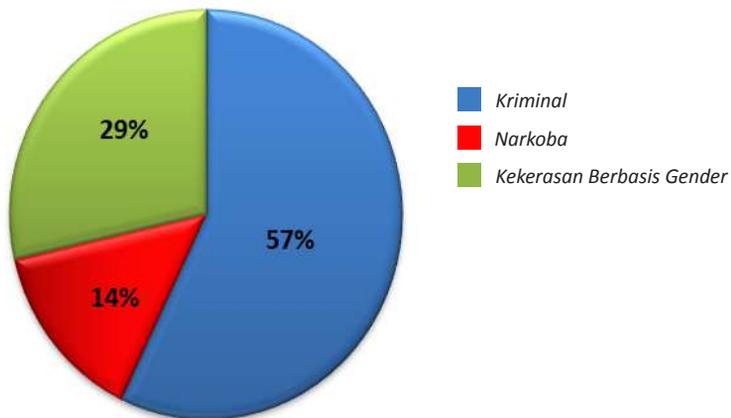
Foto 14  
Ilustrasi pendampingan hukum dari komunitas waria di kepolisian



Grafik 22  
Ratio jumlah waria yang terkena kasus hukum

## Jenis Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh waria berdasarkan jenisnya kasus hukumnya adalah sebagai berikut:

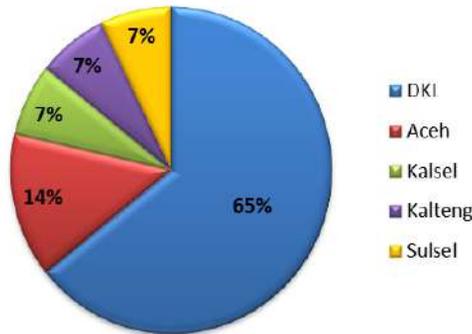


Grafik 23  
Jenis Kasus Hukum

Dari waria yang melanggar hukum diperoleh pengakuan bahwa jenis pelanggarannya terbanyak adalah kasus kriminal sebanyak 57%. Kasus kedua terbanyak adalah kasus kekerasan berbasis gender. Pelanggaran yang paling sedikit dilakukan adalah yang berhubungan dengan penggunaan narkoba sebesar 14%.

## Wilayah Pelanggaran Hukum

Berdasarkan identifikasi lokasi waria yang melanggar hukum diperoleh data sebagai berikut:



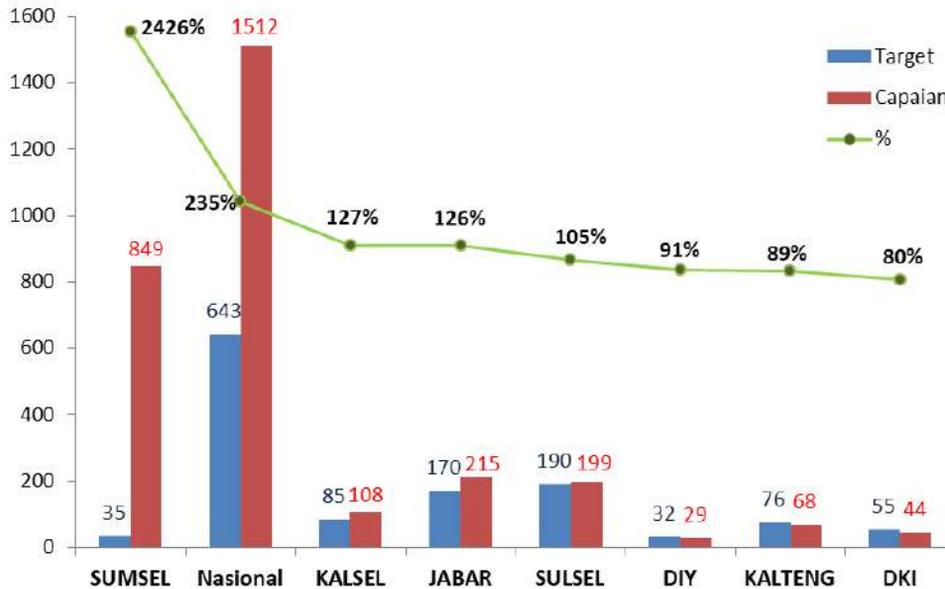
Grafik 24  
Lokasi Kejadian Kasus Hukum

Dari data waria yang melanggar hukum, diperoleh informasi bahwa waria di DKI Jakarta paling banyak melakukan pelanggaran hukum diantara waria dari provinsi lainnya. Kasus pelanggaran hukum di kalangan waria 65% lokasinya di DKI Jakarta, 14% di Aceh. Sementara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan berkontribusi sebanyak 7% dari seluruh kasus hukum di kalangan waria.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa waria yang hidup di Jakarta memiliki potensi untuk melanggar hukum lebih besar dibandingkan waria yang tinggal di provinsi lain. Penyebabnya adalah di Jakarta perjuangan untuk mempertahankan hidup jauh lebih berat dan keras dibanding provinsi lain. Akibat tekanan ekonomi yang demikian berat maka timbul nafsu yang seringkali tidak terkendali dan akhirnya berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu kesadaran dan pengetahuan hukum bagi waria di DKI Jakarta, menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

## PERAN WARIA DI KEGIATAN PUBLIK

Grafik di bawah ini, menjelaskan bahwa waria yang terlibat di dalam program Peduli, secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan publik. Kegiatan masyarakat yang diikuti oleh waria adalah kegiatan yang bersifat sosial. Data tersebut memberikan gambaran bahwa proses penerimaan sosial telah terjadi di masyarakat.



Grafik 25  
Waria Aktif  
Mengikuti Kegiatan Sosial  
di luar Program Peduli

Foto 15  
Komunitas waria dalam Festival Budaya Pasar Terapung 2015



Foto 16

Perwakilan warga yang tergabung dalam Srikandi Pasundan dan bertempat tinggal di Kiara Condong terlibat bersama Kepolisian dan Masyarakat dalam rangka pencegahan covid-19



Tidak terjadi tindakan diskriminasi atau stigma yang dialami oleh waria, membuat lingkungan nyaman bagi waria untuk berinteraksi dan menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Data di atas menjelaskan bahwa secara nasional program peduli berhasil mendorong partisipasi waria untuk aktif di kegiatan masyarakat. Capaian nasional adalah 235% atau ada 1512 waria yang terlibat di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ada empat provinsi yang berhasil mencapai target di atas 100%, yaitu provinsi Sumsel, Kalsel, Jabar dan Sulsel. Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan capaian yang paling tinggi yaitu di atas 2000 persen, dengan keterlibatan waria mencapai 849 orang dari 35 yang ditargetkan. Provinsi ranking kedua adalah Kalimantan Selatan yang mencapai 127%, dari 85 waria yang ditargetkan terlibat, ternyata lebih dari 100 waria ikut kegiatan kemasyarakatan. Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga dari prosentase pencapaian yaitu 126 persen. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mencapai di atas 100%, dengan melibatkan 199 waria dari 190 yang ditargetkan untuk mengikuti kegiatan di ruang publik. Sedangkan provinsi Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta, meskipun di bawah 100%, namun berhasil mencapai di atas 80%.

*Foto 17*  
Waria di Yogyakarta dan  
Komunitas Waria "Srikandi Pasundan", Bandung  
memberikan bantuan makanan pokok  
kepada warga terdampak covid-19



*Foto 18*  
Waria di Kota Palembang melakukan penggalangan  
donasi bencana banjir bandang di Lahat Sumsel



“

*Keluarga mengharapkan anggotanya berperilaku sebagaimana jenis kelaminnya. Namun kenyataan, terdapat keragaman ekspresi di setiap individu dan kelompok yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Reaksi keluarga yang melihat ada perbedaan tersebut juga beragam. Ada keluarga yang bisa menerima perbedaan ekspresi dan ada juga keluarga yang tidak bisa menerima.*

”

## PERUBAHAN PALING SIGNIFIKAN *MOST SIGNIFICANT CHANGE (MSC)* PROGRAM PEDULI PILAR WARIA



Foto 19  
Program Peduli Waria

### DOMAIN PERUBAHAN

Program Peduli Pilar Waria yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berhasil menciptakan perubahan yang signifikan atau *most significant change (MSC)* di lingkungan masyarakat di wilayah intervensi program Peduli. Program Peduli berhasil membuat perubahan di berbagai domain kehidupan di kalangan internal kelompok organisasi waria, masyarakat dan pemerintah (negara). Domain perubahan signifikan yang terjadi berada di area individual, kultural dan struktural.

Pengertian perubahan yang dimaksud dalam domain di atas adalah sebagai berikut:

1. Domain Perubahan individual adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang waria setelah mengikuti dan terlibat aktif di dalam kegiatan Program Peduli Pilar Waria. Perubahan dalam gaya hidup, pekerjaan dan relasi sosial ke arah yang lebih produktif dan positif.
2. Domain Perubahan kultural adalah perubahan sikap dan norma hubungan sosial dari sekelompok masyarakat yang diwujudkan di ruang publik yang diapresiasi oleh masyarakat sebagai pengakuan atas keberadaan komunitas waria. Kelompok masyarakat umum yang semula memandang bahwa waria adalah obyek persekusi dan eksploitasi seksual, kemudian masyarakat berubah menjadi menerima dan mengakui keberadaan waria sebagai bagian dari kegiatan bersama masyarakat di ruang publik.
3. Domain Perubahan struktural adalah perubahan struktural terjadi pada lingkup organisasi atau kelompok waria dan perubahan struktural yang terjadi di lingkup eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang diterbitkan khusus untuk komunitas waria dalam upaya pemenuhan hak hidup waria.
  - a. Perubahan struktural kelompok/organisasi waria  
Terjadi proses regenerasi di dalam organisasi waria, sehingga waria junior mendapat kesempatan untuk memimpin dan menjalankan roda organisasi. Sehingga mekanisme regenerasi mulai ditumbuhkan di dalam manajemen organisasi yang selama ini didominasi oleh waria yang

senior. Keterbukaan atau transparansi manajemen juga mulai diperkenalkan kepada seluruh anggota waria.

b. Perubahan struktural kebijakan pemerintah

Adanya *afirmatif policy* (kebijakan afirmatif) yang dikhususkan kepada kelompok waria yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok waria tidak bisa disetarakan dengan unit usaha yang dikelola oleh masyarakat umum. Selain kebijakan khusus, pemerintah juga mengakui keberadaan organisasi waria melalui penerimaan pendaftaran organisasi waria sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun ada beberapa kelengkapan syarat administrasi yang masih di dalam proses penyelesaian, tetapi pihak pemerintah daerah sudah memberikan pengakuan secara verbal agar organisasi waria segera menyelesaikan kelengkapannya.



Foto 20  
Program Officer PKBI Pusat berbincang dengan Country Representative The Asia Foundation, Indonesia dan perwakilan DFAT

## FASILITATOR DAN AGEN PERUBAHAN

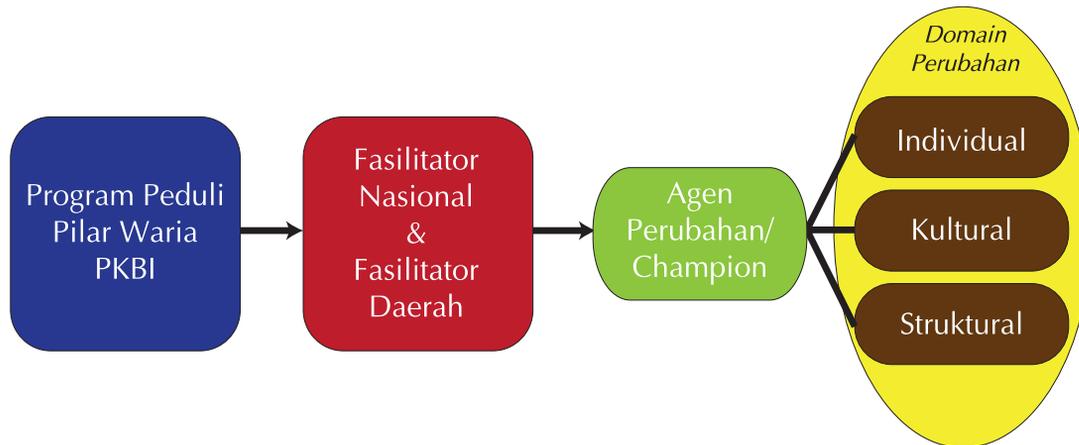
Perubahan yang paling signifikan di dalam implementasi Program Peduli tidak terlepas dari peran fasilitator program dan *champion* sebagai agen perubahan.

Fasilitator PKBI ada di tingkat nasional dan daerah. Fasilitator nasional yang ditunjuk oleh PKBI Pusat telah berhasil meningkatkan kapasitas fasilitator di daerah yang direkrut oleh PKBI Daerah dan mitra pelaksana lainnya di lokasi Program Peduli. Fasilitator tersebut mampu menjadi katalisator lahirnya agen perubahan atau *champion* di kelompok waria.

*Champion* atau agen perubahan adalah waria yang memiliki kemampuan pengorganisasi dan menggerakkan komunitas waria untuk membuat perubahan. *Champion* tersebut tidak bisa dipisahkan karena hubungan yang saling membantu diantara keduanya telah menyebabkan perubahan kondisi yang berbeda jika dibandingkan sebelum dan setelah ada Program Peduli.

Kerja fasilitator dan *champion* tidak hanya bersifat administratif manajemen program. Tetapi bersifat strategis dengan melakukan kegiatan pengorganisasian dan penyadaran di kelompok waria. Selain itu juga melakukan kegiatan advokasi yang ditujukan kepada pemerintah di daerah untuk melakukan perubahan kebijakan dalam merespon kebutuhan waria.

Gambaran secara umum konsep domain perubahan fasilitator dan agen perubahan dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



Grafik 26  
Skema konsep domain perubahan dari Program Peduli Pilar Waria PKBI

Diagram di samping menjelaskan bahwa Program Peduli Pilar Waria digerakan oleh Fasilitator Nasional dan Daerah yang direkrut oleh PKBI. Kemudian fasilitator tersebut mengimplementasikan strategi program untuk melahirkan *champion-champion* di tingkat komunitas waria.

*Champion* tersebut berhasil menciptakan perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh komunitas waria. Perubahan tersebut di tiap daerah berbeda-beda. Ada perubahan yang menonjol di domain individu, ada daerah yang menonjol di domain kultural dan ada daerah yang menonjol perubahannya di domain struktural.



Foto 21  
Stella, potret salah seorang waria yang pernah menjalani profesi sebagai pekerja seks, kini aktif sebagai *Community Organizer* di PKBI.

## PERUBAHAN SIGNIFIKAN DOMAIN INDIVIDUAL

Keberhasilan Program Peduli Pilar Waria di dalam menciptakan perubahan signifikan domain individual terjadi di Kalimantan Tengah. Perubahan dialami oleh Stella, dengan riwayat perjalanan hidup sebagai berikut:

- Stella adalah seorang waria yang sudah menjalani pekerjaan sebagai penjual seks komersil selama lebih dari 10 tahun, setelah ikut Program Peduli Pilar Waria yang dilaksanakan oleh PKBI, kemudian Stella berubah menjadi seorang staf program yaitu sebagai *community organizer* (CO) di PKBI Kalimantan Tengah.
- Stella pada tahun 2005 telah merantau ke Batam menjalani kehidupan sebagai pekerja seksual komersil. Pekerjaan tersebut dilewati dengan berpindah-pindah lokasi atau lokalisasi. Pernah di Ambarawa Jawa Tengah selama 3 tahun, di daerah wisata yang sekaligus banyak lokasi penginapan dan warung minuman alkohol dan tempat hiburan dangdut dan karaoke. Kemudian pernah juga di Lokalisasi Sembir di Salatiga selama 2 tahun.

- Perubahan terjadi mulai tahun 2015 ketika Stella kembali ke Palangkaraya dan masih menjadi pekerja seks, kemudian Stella mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBI Kalimantan Tengah. Karena Stella selalu aktif mengikuti kegiatan, maka komunitas Waria sepakat untuk mengangkat Stella menjadi Sekretaris komunitas. Sejak saat itu Stella juga menjadi kader waria yang dikoordinir oleh PKBI Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada Juni 2017 Stella ditunjuk sebagai *Community organizer* Program Peduli PKBI.
- Status sosial individu yang dialami Stella dari seorang pekerja seks menjadi seorang staf program di lembaga PKBI Kalimantan Tengah merupakan perubahan yang paling signifikan. Sejak terlibat dalam Program Peduli, Stella tidak lagi menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks. Dengan demikian risiko tertular penyakit, risiko mengalami kekerasan, mengalami stigma dan diskriminasi dan kekurangan penghasilan seketika dapat dihapuskan dengan perubahan status sosial sebagai seorang staf program.



Foto 22  
Perubahan signifikan dalam domain kultural pada masyarakat yang mulai bersikap terbuka menerima waria.

## PERUBAHAN SIGNIFIKAN DOMAIN KULTURAL

Keberhasilan Program Peduli Pilar Waria di dalam menciptakan perubahan signifikan domain kultural terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perubahan kultural tersebut diuraikan satu per satu per provinsi sebagai berikut:

- Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah terdapat organisasi waria yang disebut IWAPA (Ikatan Waria Palangkaraya). Pada saat peringatan hari ulang tahun Palangkaraya diselenggarakan pawai budaya yang diikuti oleh IWAPA. Kehadiran IWAPA di dalam pawai budaya tersebut menunjukkan bahwa komunitas waria diterima sebagai bagian dari masyarakat yang ikut serta berpartisipasi di dalam acara di ruang publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengakuan tersebut membuktikan bahwa ada perubahan sikap dan norma yang semula tidak mengakui keberadaan waria, kemudian setelah ada program peduli pilar waria yang mendorong komunitas untuk tampil di publik,

akhirnya pemerintah dan masyarakat bisa menerima kehadiran waria. Perubahan kultural tersebut mengindikasikan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap waria di dalam masyarakat. Selain partisipasi waria di dalam peringatan peringatan HUT Palangkaraya, komunitas waria juga mengikuti acara pentas seni di Desa Panarung pada tahun 2016.

- Kalimantan Selatan

Ikatan Waria di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan atau dikenal dengan IWATALA, mengalami perubahan yang signifikan sejak terlibat di dalam acara *Tanah Laut Gowes Cross Country*. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tanah Laut yang tahun 2019 sudah yang ke-4 pada tahun 2019. Awalnya IWATALA tidak pernah terlibat di dalam kegiatan publik tersebut. Namun sejak IWATALA sering mengadakan kegiatan bersama masyarakat yang positif, diantaranya *senam zumba* dan olahraga *volley* bersama masyarakat. Akhirnya panitia gowes mengundang IWATALA untuk terlibat di dalam kepanitiaan kegiatan tersebut. Para peserta gowes yang hadir 5000 orang lebih, banyak yang terheran-heran bagaimana caranya waria bisa terlibat di dalam kegiatan yang diikuti oleh peserta dari provinsi lain di luar Kalimantan. Keterlibatan waria di dalam kegiatan publik yang berskala besar, menunjukkan bahwa keberadaan komunitas waria di Kalimantan Selatan sudah diakui publik dan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi serta persekusi yang biasanya dialami oleh waria.



Foto 23

Ir. Januminro, MSi. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya.

Profil salah satu tokoh/pejabat yang terbuka untuk memberikan pelayanan kepada warga komunitas waria.

## PERUBAHAN SIGNIFIKAN DOMAIN STRUKTURAL

Keberhasilan Program Peduli Pilar Waria di dalam menciptakan perubahan signifikan domain struktural terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Perubahan struktural kebijakan terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sedangkan perubahan struktural organisasi waria terjadi di Sumatera Selatan. Satu per satu uraian perubahan per provinsi sebagai berikut:

- Kalimantan Tengah

IWAPA sebagai payung organisasi waria di Palangkaraya mengalami perubahan signifikan setelah Program Peduli Pilar Waria dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Perubahannya berupa pembenahan struktur kepengurusan dan bahkan mendapat ruangan sekretariat di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalteng. Selain itu IWAPA juga sudah terdaftar sebagai ormas sesuai dengan UU no.17 tahun 2013. Oleh sebab itu organisasi waria tidak bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali



Gambar 2  
 Surat Keterangan Terdaftar

oleh keputusan pengadilan dan anggota organisasi yang bersangkutan bersepakat untuk membubarkan diri. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan struktural dari sekedar organisasi komunitas untuk tempat berkumpul dan bertemu waria, sekarang organisasi IWAPA kedudukannya sejajar dengan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya.

- Kalimantan Selatan  
 Kebehasilan organisasi waria di Kalimantan Selatan dalam perubahan struktural terjadi di Kabupaten Tanah Laut. IWATALA berhasil memperjuangkan ijin usaha yang dimiliki oleh anggota IWATALA berupa ijin pemasangan reklame usaha Salon Tiara. Persyaratan ijin usaha tersebut mendapatkan dispensasi dan kemudahan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sehingga salon tersebut beroperasi seperti usaha formal lainnya.

- Sumatera Selatan

Organisasi waria di Sumatera Selatan secara formal merupakan organisasi sayap dari MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong yang berafiliasi ke partai politik Golkar yang disebut Himpunan Waria MKGR (HW MKGR). Di awal kepemimpinan Ita, HW MKGR menerapkan mekanisme organisasi yang tertutup hanya dikelola oleh Ketua dan kawan-kawan dekatnya. Keberanian ketua melakukan hal tersebut karena memiliki hubungan kedekatan dengan keluarga gubernur. Pada masa kepemimpinan Ita, tidak ada regenerasi di dalam organisasi. Setelah program peduli diimplementasikan di Sumatera Selatan, komunitas waria dikategorikan sebagai CBO di bawah PKBI Sumatera Selatan. Selanjutnya terjadi pergantian komunitas waria yang dipimpin oleh waria yang junior bernama Helena. Dan selanjutnya akhirnya komunitas waria bergabung kembali ke dalam HW MKGR. Perubahan kepemimpinan dari yang senior ke yang junior merupakan perubahan struktur dari mekanisme yang tertutup ke mekanisme yang terbuka sehingga memberikan peluang kepada waria yang lebih muda untuk memimpin organisasi.

## 05

## ANALISA DAN KESIMPULAN

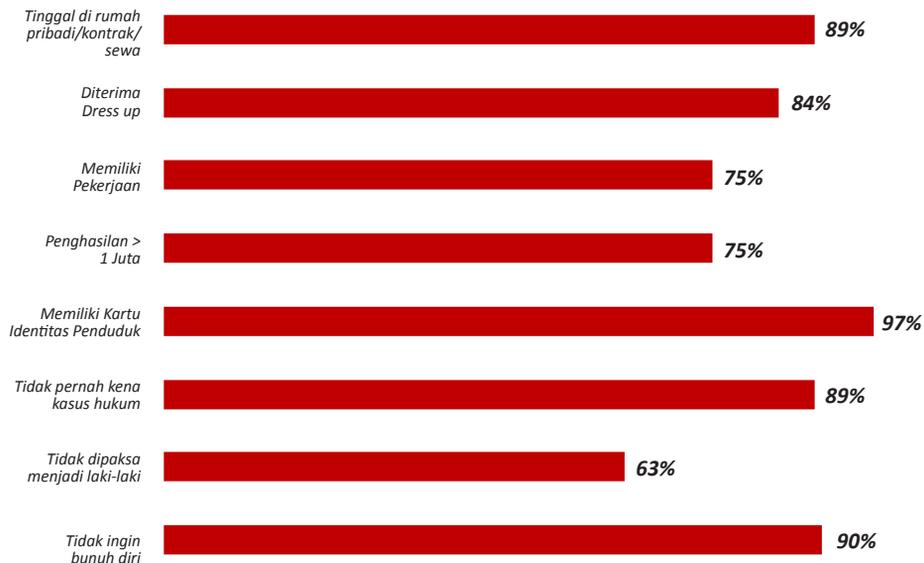


Foto 24  
ilustrasi diskusi via aplikasi zoom tentang Waria  
dalam Program Peduli

Keberadaan waria di tengah keluarga dan masyarakat, menimbulkan reaksi yang beragam dari setiap keluarga maupun masyarakat. Data yang dikumpulkan lebih banyak memotret waria dari sisi keluarga. Pandangan masyarakat tentang waria dan pandangan waria kepada reaksi masyarakat tidak menjadi fokus penulisan profil ini.

Analisa terhadap data-data di atas, berpusat kepada dua aspek yaitu status penerimaan waria di dalam keluarga dan pemenuhan hak sipil waria oleh negara. Penerimaan waria oleh keluarga menjadi faktor penting bagaimana waria menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan pemenuhan hak sipil waria berupa hak memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan identitas kependudukan dan hak pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negara tanpa tebang pilih.

Tidak semua waria di terima oleh keluarganya. Mengingat masih dominannya pandangan biner gender di masyarakat dan semakin melekat setelah diperkuat oleh argumentasi nilai agama. Oleh sebab itu berangkat dari status penerimaan waria oleh keluarga dapat dipotret profil waria sebagai berikut:

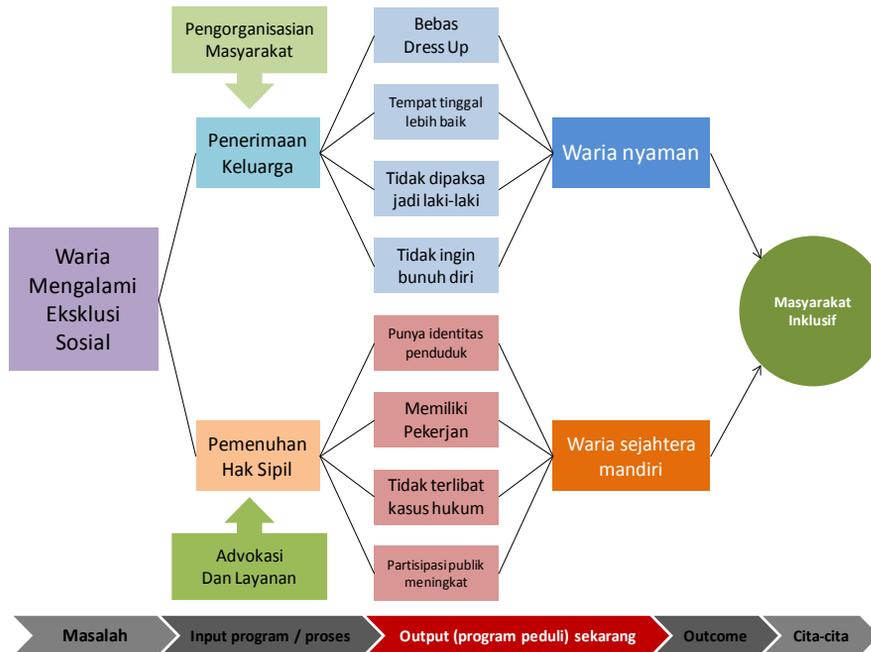


Grafik 27  
Hubungan Penerimaan Keluarga terhadap Waria dengan Beberapa Variabel

Data di atas menegaskan bahwa penerimaan waria oleh keluarga memberikan pengaruh positif kepada berbagai aspek kehidupan. Ekspresi waria dalam menggunakan pakaian wanita atau *dress up* 84% dapat diterima oleh keluarga. Pekerjaan dan penghasilan mereka juga dapat dikategorikan cukup untuk kebutuhan hidupnya dirasakan oleh 75% waria yang diterima oleh keluarga. Ada 97% waria yang diterima oleh keluarga sudah memiliki kartu identitas penduduk dan 89% waria tersebut tidak pernah mengalami kasus hukum.

Kondisi psikologis waria yang diterima oleh keluarga tampak lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diterima oleh keluarga. Buktinya ada 90% waria tersebut tidak ingin bunuh diri. Dan 63% waria yang diterima keluarga tidak dipaksa untuk menjadi laki-laki.

Analisis dari data profil waria yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 28  
Bagan Analisis data  
profil waria

Berdasarkan analisa tersebut, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Hak sipil waria sebagai warga negara sebagian besar sudah dipenuhi dengan baik oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya advokasi dan perjuangan kelompok waria yang terorganisir di dalam Program Peduli berhasil meningkatkan posisi sosial waria menjadi setara dengan warga negara lainnya.
2. Akses mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih harus diperjuangkan lebih keras lagi, mengingat masih ada waria yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Terutama waria yang masih memilih pekerjaan mejadi pekerja seks sebagai mata pencahariannya.
3. Akses kesehatan masih kurang baik, mengingat tidak semua waria tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah. Bahkan masih banyak yang menggunakan uang sendiri untuk mendapat layanan kesehatan. Hal yang positif adalah di tempat layanan kesehatan waria dapat mengakses berbagai jenis layanan tanpa diskriminasi.
4. Kasus hukum yang menimpa waria meskipun sedikit, namun pelanggaran hukum sekecil apapun akan berakibat negatif terhadap keberadaan waria di tengah masyarakat. Oleh sebab itu perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai persoalan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua waria melek hukum atau sadar hukum.
5. Kecenderungan keluarga memaksa waria untuk menjadi laki-laki, masih terjadi. Meskipun angkanya di bawah 50%, namun tekanan keluarga tersebut tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

Hal ini mengakibatkan waria mengalami tekanan psikis yang berat. Pemahaman keluarga terhadap perilaku atau kebiasaan waria perlu terus disosialisasikan sehingga semua keluarga di Indonesia dapat menerima dengan terbuka keberadaan waria di tengah masyarakat.

6. Gejala ingin bunuh diri merupakan reaksi psikis atas tekanan yang dialami waria. Persentasenya keinginan bunuh diri dianggap masih tinggi karena berkisar antara 10%-20%. Oleh sebab itu, untuk mengurangi keinginan bunuh diri, perlu dihilangkan faktor yang menyebabkan waria mengalami tekanan psikis yaitu faktor tekanan dari keluarga dan faktor ekonomi.
7. Perubahan yang paling signifikan (*most significant change*) dialami oleh waria pada domain individu, kultural dan struktural. Proses perubahan tersebut terjadi karena ada peran dari fasilitator nasional, fasilitator daerah dan agen perubahan dari kelompok waria.
8. Perubahan kebijakan pemerintah merupakan perubahan struktural yang paling menonjol di Kalimantan Tengah dan Selatan sehingga komunitas waria dapat diakui secara formal organisasinya dan unit usaha waria disejajarkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Akhirnya kesejahteraan waria semakin meningkat.
9. Partisipasi waria di dalam kegiatan masyarakat khususnya kegiatan sosial semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa terjadi perubahan di masyarakat bahwa penerimaan sosial waria semakin tinggi.
10. Kesejahteraan waria semakin membaik seiring dengan berjalannya Program Peduli Pilar Waria.

“

*pemenuhan hak sipil waria berupa hak memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan identitas kependudukan dan hak pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negara tanpa tebang pilih.*

”

Program Peduli yang selama ini berjalan di pilar waria, perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Rekomendasi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program adalah sebagai berikut:

1. **Ketrampilan kerja waria ditingkatkan**, dengan langkah awal melakukan asesmen menyeluruh terhadap potensi, bakat, talenta, tingkat pendidikan waria dan minat usaha. Agar pelatihan ketrampilan kerja yang akan diberikan kepada waria sesuai dengan kemampuan yang dimiliki waria dan sesuai dengan minat usaha yang dipilih waria tersebut.
2. **Penyadaran hukum kepada waria** dan pelatihan paralegal terutama untuk waria yang tidak tinggal di Jakarta, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Agar waria mengerti konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Disamping itu, jika ada temannya yang tersangkut kasus hukum, dapat langsung didampingi oleh paralegal sebelum ada pembela hukum yang ditunjuk.
3. **Mengubah paradigma masyarakat tentang dominasi gender**. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa ada ekspresi personal yang berbeda dengan jenis kelaminnya seperti waria. Untuk mengubah paradigma masyarakat tersebut, perlu disusun argumentasi yang

tidak berbenturan dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Bila perlu menggali nilai budaya lokal yang mendukung penerimaan sosial waria di masyarakat, seperti di masyarakat Bugis dengan *Bissu*.

4. **Penanaman etika kemanusiaan kepada masyarakat dan waria** menjadi syarat mutlak untuk mencapai proses inklusi yang abadi. Nilai tersebut akan menumbuhkan sikap anti diskriminasi antara masyarakat dengan waria, maupun diantara sesama waria agar saling mendukung dan membantu.
5. **Strategi khusus untuk daerah dengan indeks toleransi rendah.** Perlu disusun strategi khusus untuk mengembangkan program peduli dengan pilar waria di daerah provinsi yang masyarakatnya cenderung intoleran dan rendah penegakan HAM. Strategi ini untuk mengantisipasi persekusi, diskriminasi dan kekerasan yang mungkin akan dialami oleh waria.
6. **Monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan sistematis** untuk memantau perkembangan kemajuan dan *most significant change (MSC)* Program Peduli secara kualitatif dan kuantitatif. Mekanisme *monitoring* dapat diintegrasikan kedalam struktur program.

Demikian rekomendasi yang dirumuskan untuk meningkatkan kualitas Program Peduli dan kesejahteraan waria.



PKBI

**PERTEMUAN**

**FORUM KELUARGA PROGRAM PEDULI  
KABUPATEN TANAH LAUT**

PROGRAM  
**peduli**



Berdiri sejak 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Saat ini, menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi, juga maraknya tindak intoleransi dalam keluarga dan terhadap kelompok minoritas, PKBI mengembangkan programnya berdasarkan semboyan “Mewujudkan Keluarga Berencana Bertanggung Jawab dan Toleran”.

PKBI kini tersebar di 28 provinsi, mencakup 243 kota/kabupaten di Indonesia. PKBI merupakan satu diantara 184 negara yang menjadi anggota penuh IPPF (*Internatioanal Planned Parenthood Federation*) sejak 1869.

Telepon: +62 21 7207372 | E-mail: [ippa@pkbi.or.id](mailto:ippa@pkbi.or.id) | Website: [www.pkbi.or.id](http://www.pkbi.or.id)

PROGRAM  
peduli

